

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR DETERMINAN E-PARTISIPASI

DI ASIA



SKRIPSI

Oleh :

Terra Blasefa

21312078

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

Analisis Faktor-Faktor Determinan E-Partisipasi di Negara-Negara Asia

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Terra Blasefa

No. Mahasiswa : 21312078

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, 20 Februari 2025
Penulis,

The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp is yellow and red, with the text 'STAMP' and 'TEMPER' visible. Below the stamp, the name 'TERRA BLASEFA' is printed in black.

(Terra Blasefa)

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Faktor-Faktor Determinan E-Partisipasi di Negara-Negara Asia

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Terra Blasefa

21312078

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 20 Februari 2025

Dosen Pembimbing,



(Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Faktor-Faktor Determinan E-Partisipasi Negara-Negara di Asia

Disusun oleh : TERRA BLASEFA

Nomor Mahasiswa : 21312078

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 04 Maret 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Penguji : Maulidyati Aisyah, SE., M.Com(Adv.), CMA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbill'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Determinan E-Partisipasi di Negara-Negara Asia” ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Maka dari itu pada kesempatan kali ini dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, kekuatan, dan petunjuk dalam setiap langkah hidup penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orangtua, Bapak Kushertanto dan Ibu Susanty, terimakasih selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang tanpa henti dan pengorbanan yang tiada batas sepanjang hidup hingga penulis bisa berada di titik ini, semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Kakakku Tessa Festiana, yang selalu menjadi sumber motivasi dan inspirasi. Terimakasih atas semangat dan dukungan yang selalu menguatkan penulis.
4. Diriku sendiri, terimakasih telah tetap kuat dan bertahan, terimakasih telah melalui setiap tantangan meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah.
5. Bapak Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dengan sabar dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

6. M. Nazwa Gymnastiar, selaku orang yang selalu ada untuk memberi semangat, perhatian, tenaga, dan waktu dalam segala kondisi dan menjadi penghibur dikala masa sulit, terimakasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
7. Sahabat seperjuangan penulis ‘Babygurl’ Wella Eventsiy dan Chairunnisa Bayuningtyas, yang selalu ada di saat suka dan duka, terimakasih atas kebersamaan, hiburan, dan segala bantuan.
8. Sahabat penulis ‘dprd’ Abel, Jeje, Muha, Mutia, Mayla, Marini, yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dari masa Sekolah Menengah Pertama hingga saat penulisan skripsi ini selesai.
9. Sahabat penulis seluruh anggota ‘KKN Unit 197’ yang selalu memberikan kehangatan dan semangat, terimakasih telah menjadi penyemangat dan penghibur di saat-saat sulit sampai penyusunan skripsi ini selesai.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulisan skripsi ini selesai, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menunjang kemajuan ilmu pengetahuan kedepannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2025

Penulis,

(Terra Blasefa)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	8
2.1.2. E-Partisipasi	9
2.1.3. <i>Worldwide Governance Indicators</i> (WGI).....	9
2.1.4. <i>E-Government Development Index</i> (EGDI).....	10
2.2. Penelitian Terdahulu	12
2.3. Pengembangan Hipotesis	15
2.3.2. Pengaruh Supremasi Hukum terhadap tingkat E-Partisipasi	16
2.3.3. Pengaruh Efektivitas Pemerintah terhadap tingkat E-Partisipasi.....	17
2.3.4. Pengaruh Kebebasan Berpendapat terhadap tingkat E-Partisipasi	19
2.3.5. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap tingkat E-Partisipasi	20
2.3.6. Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi terhadap tingkat E-Partisipasi	22

2.4.	Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		25
3.1.	Jenis dan Sumber Data.....	25
3.2.	Definisi dan Pengukuran Variabel	26
3.2.1.	Variabel Dependen	26
3.2.2.	Variabel Independen.....	26
3.3.	Analisis Data.....	28
3.3.1.	Model Regresi Data	28
3.3.2.	Uji Estimasi Model	29
3.3.3.	Uji Asumsi Klasik.....	30
3.3.4.	Uji Hipotesis	31
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		33
4.1.	Deskripsi Data Penelitian.....	33
4.2.	Statistik Deskriptif Variabel	33
4.3.	Uji Estimasi Model	35
4.3.1.	Uji Chow	35
4.3.2.	Uji Hausman	36
4.4.	Uji Asumsi Klasik.....	36
4.4.1.	Uji Multikolinearitas	36
4.5.	Uji Hipotesis	37
4.5.1.	Uji t	37
4.5.2.	Uji F	38
4.5.3.	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	38
4.6.	Pembahasan.....	39
4.6.1.	Pengaruh Pengendalian Korupsi terhadap E-Partisipasi.....	39
4.6.2.	Pengaruh Supremasi Hukum terhadap E-Partisipasi	40
4.6.3.	Pengaruh Efektivitas Pemerintah terhadap E-Partisipasi.....	41
4.6.4.	Pengaruh Kebebasan Berpendapat terhadap E-Partisipasi	42
4.6.5.	Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap E-Partisipasi.....	42
4.6.6.	Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi terhadap E-Partisipasi.....	43

KESIMPULAN DAN SARAN	45
5.1. Kesimpulan	45
5.2. Implikasi	46
5.3. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3. 1 Kriteria Pemilihan Model.....	30
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	33
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	36
Tabel 4. 3 Hasil Uji t.....	37
Tabel 4. 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 3. 1 Rumus Adjusted R ²	31

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Korupsi, Supremasi Hukum, Efektivitas Pemerintah, Kebebasan Berpendapat, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Telekomunikasi terhadap tingkat E-Partisipasi di negara-negara Asia. Sampel pada penelitian ini menggunakan data dari 47 negara di Asia dengan masing-masing enam dataset pada periode 2010-2020 dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pengendalian Korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap E-Partisipasi sementara Supremasi Hukum dan Efektivitas Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat E-Partisipasi, sedangkan Kebebasan Berpendapat dan Sumber Daya Manusia berpengaruh positif tidak signifikan dan Infrastruktur Telekomunikasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat E-Partisipasi.

Kata Kunci: Pengendalian Korupsi, Supremasi Hukum, Efektivitas Pemerintah, Kebebasan Berpendapat, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Telekomunikasi, E-Partisipasi, *Fixed Effect Model*

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of Corruption Control, Rule of Law, Government Effectiveness, Freedom of Expression, Human Resources, and Telecommunication Infrastructure on the level of E-Participation in Asian countries. The sample used in this study consists of data from 47 countries in Asia, with six datasets each for the period 2010-2020, analyzed using the Fixed Effect Model. The results of the study indicate that Corruption Control has a positive significant effect on E-Participation, while Rule of Law and Government Effectiveness have a negative significant effect on the level of E-Participation. Meanwhile, Freedom of Expression and Human Resources have a positive but insignificant effect, and Telecommunication Infrastructure has a negative but insignificant effect on E-Participation.

Keywords: Corruption Control, Rule of Law, Government Effectiveness, Freedom of Expression, Human Resources, Telecommunication Infrastructure, E-Participation, Fixed Effect Model.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara-negara di Asia menunjukkan variasi yang signifikan dalam perkembangan ekonomi dan sosial, dengan beberapa negara mencapai kemajuan pesat dalam pembangunan digital, sementara lainnya masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan berbasis teknologi. Partisipasi elektronik merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung keterlibatan masyarakat dalam tata kelola dan proses pengambilan keputusan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi, legitimasi, serta kepercayaan terhadap pemerintahan dengan memperluas jangkauan dan kedalaman partisipasi warga. Konsep ini mengubah pola interaksi konvensional antara pemerintah dan masyarakat, mendorong komunikasi yang lebih langsung serta bermakna. Namun, penerapannya juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat mencapai manfaat maksimal (Mariani et al., 2024). Terjadinya fenomena yaitu meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan di berbagai negara, yang ditandai dengan adopsi sistem *e-government* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Negara-negara maju seperti Singapura dan Korea Selatan memiliki tingkat partisipasi digital yang tinggi, sedangkan negara berkembang seperti Myanmar dan Afganistan masih tertinggal akibat keterbatasan akses teknologi serta kendala sosial dan politik.

Electronic Development Government Index (EDGI) yang dikembangkan oleh *United Nations* menjadi salah satu alat ukur utama dalam menilai kemampuan implementasi pemerintahan digital dan e-partisipasi di berbagai negara. *E-Participation Index* yang merupakan bagian dari EDGI mencerminkan kesiapan

teknologi suatu negara sekaligus sejauh mana pemerintah mampu menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui media digital (Choi & Lee, 2020). Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat e-partisipasi menjadi aspek yang perlu diperhatikan, terutama di era digital saat ini. Pemerintah di berbagai negara, termasuk di Asia, semakin mengandalkan pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Namun, disparitas dalam kesiapan digital antarnegara menjadi tantangan yang perlu diatasi agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi secara setara dalam pemerintahan digital. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat e-partisipasi, kebijakan yang diterapkan bisa kurang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Asia dipilih sebagai objek penelitian dalam studi ini didasarkan pada beberapa faktor utama. Dari segi ekonomi, Asia merupakan benua dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, yang didukung oleh meningkatnya investasi dalam teknologi digital serta kebijakan pemerintah yang mendukung transformasi digital (World Bank, 2023). Negara-negara seperti China, Jepang, dan India menjadi pusat inovasi teknologi, sementara negara berkembang di kawasan Asia masih menghadapi tantangan dalam membangun infrastruktur digital yang memadai. Dari perspektif politik internasional, Asia juga menjadi wilayah yang dinamis dalam tata kelola pemerintahan digital, dengan variasi sistem politik dari negara demokratis hingga otoriter yang mempengaruhi tingkat e-partisipasi (Kshetri, 2021). Selain itu, Asia memiliki populasi terbesar di dunia dengan keragaman sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat luas, menjadikannya kawasan yang menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan e-partisipasi. Populasi yang besar ini menciptakan tantangan

tersendiri dalam memastikan keterjangkauan layanan digital serta kesenjangan dalam akses teknologi.

Perkembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Asia sangat bervariasi, mencerminkan tingkat kesiapan digital yang beragam di antara negara-negara di kawasan ini. Beberapa negara seperti Korea Selatan dan Jepang telah memiliki jaringan internet yang sangat maju dengan kecepatan tinggi dan cakupan luas, sementara negara-negara berkembang masih berjuang untuk menyediakan akses internet yang merata bagi seluruh warganya. Faktor ini memperlihatkan betapa kompleksnya lanskap digital di Asia dan menjadikannya sebagai objek penelitian yang relevan untuk memahami bagaimana kondisi infrastruktur telekomunikasi dapat mempengaruhi e-partisipasi. Banyak negara di Asia yang mulai mengadopsi kebijakan inklusif untuk mempercepat transformasi digital, termasuk dalam layanan pemerintahan berbasis elektronik. Namun, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, tingkat literasi digital yang berbeda-beda, serta regulasi yang masih berkembang menjadi hambatan yang harus diatasi agar partisipasi digital dapat optimal di seluruh lapisan masyarakat.

Data *E-Participation Index* dari *United Nations* menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antarnegara di Asia. Singapura dan Korea Selatan, misalnya, berada di peringkat teratas dengan skor e-partisipasi yang tinggi, masing-masing mencapai 0,95 dan 0,93 dari skala 1, mencerminkan keberhasilan mereka dalam membangun infrastruktur digital yang memadai dan memastikan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebaliknya, negara-negara seperti Myanmar dan Afganistan menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi digital masyarakat akibat keterbatasan akses teknologi serta kendala sosial dan politik, dengan skor masing-masing hanya mencapai 0,31 dan 0,28. Permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah bagaimana

faktor-faktor tata kelola pemerintahan, seperti pengendalian korupsi (*Control of Corruption*), supremasi hukum (*Rule of Law*), efektivitas pemerintahan (*Government Effectiveness*), kebebasan berpendapat (*Voice and Accountability*), kualitas sumber daya manusia (*Human Capital*), serta infrastruktur telekomunikasi (*Telecommunication Infrastructure*), berkontribusi terhadap tingkat partisipasi digital di suatu negara.

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi studi tambahan yang disarankan oleh (Lee-geiller, 2024). Dalam penelitiannya, Lee-geiller menyarankan untuk mendapatkan pemahaman *good governance*, telekomunikasi yang mapan, dan keragaman demografi yang dapat mempengaruhi kesiapan E-partisipasi dalam pemerintahan. Namun dari penelitian tersebut, peneliti hanya fokus pada beberapa variabel independen yang ada. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder pada negara-negara Asia, dengan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber terpercaya seperti laporan resmi, *United Nations Survey*, *World Bank*, dan *Worldwide Governance Indicators*. Studi ini menerapkan analisis statistik untuk menguji hubungan antara Pengendalian Korupsi, Supremasi Hukum, Efektivitas Pemerintah, Kebebasan Berpendapat, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Telekomunikasi terhadap E-Partisipasi di kawasan Asia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan mengangkat judul "Analisis Faktor-Faktor Determinan E-Partisipasi di Negara-Negara Asia." Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aspek EDGI dan WGI serta bagaimana kedua aspek tersebut berkontribusi terhadap tingkat E-Partisipasi di Asia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pengendalian Korupsi (*Control of Corruption – COC*) berpengaruh terhadap tingkat E-Partisipasi (*E-Participation – EPT*)?
2. Apakah Supremasi hukum (*Rule of Law – ROL*) berpengaruh terhadap tingkat E-Partisipasi (*E-Participation – EPT*)?
3. Apakah Efektivitas Pemerintah (*Government Effectiveness – GEV*) berpengaruh terhadap tingkat E-Partisipasi (*E-Participation – EPT*)?
4. Apakah Kebebasan Berpendapat (*Voice and Accountability – VOA*) berpengaruh terhadap tingkat E-Partisipasi (*E-Participation – EPT*)?
5. Apakah Sumber Daya Manusia (*Human Capital – HUC*) berpengaruh terhadap tingkat E-Partisipasi (*E-participation – EPT*)?
6. Apakah Infrastruktur Telekomunikasi (*Telecommunication Infrastructure – TI*) berpengaruh terhadap tingkat E-Partisipasi (*E-Participation – EPT*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Meneliti dan menganalisis pengaruh Pengendalian Korupsi (COC) terhadap tingkat E-Partisipasi (EPT)
2. Meneliti dan menganalisis pengaruh Supremasi hukum (ROL) terhadap tingkat E-Partisipasi (EPT)
3. Meneliti dan menganalisis pengaruh Efektivitas Pemerintah (GEV) terhadap tingkat E-Partisipasi (EPT)
4. Meneliti dan menganalisis pengaruh Kebebasan Berpendapat (VOA) terhadap tingkat E-Partisipasi (EPT)
5. Meneliti dan menganalisis pengaruh Sumber Daya Manusia (HUC) terhadap tingkat E-Partisipasi (EPT)

6. Meneliti dan menganalisis pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi (TI) terhadap tingkat E-Partisipasi (EPT)

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

Memperdalam pemahaman tentang kaitan antara kebijakan, infrastruktur, dan e-partisipasi, serta menyediakan referensi untuk pengembangan riset selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan saran dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam *E-Government* dan memperbaiki tata kelola pemerintah

3. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya e-partisipasi dan bagaimana berbagai faktor mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang saling berkaitan dan berurutan, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pengantar yang menjelaskan konteks latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur penyusunan penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan secara rinci teori-teori dasar yang mendasari pengembangan hipotesis penelitian, diikuti dengan tinjauan literatur, kerangka logika penelitian, dan penyusunan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini akan menguraikan secara rinci setiap langkah dan komponen penelitian, termasuk rencana penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, metode pengumpulan dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mengandung inti penelitian, menyajikan dan membahas hasil analisis data dan data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan metode yang telah direncanakan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi ringkasan hasil pengujian serta diskusi menyeluruh tentang penelitian lanjutan, dan pengaruh hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan Teori Agensi (*Agency Theory*) sebagai landasan utama dalam menganalisis e-partisipasi di negara-negara Asia. Teori Agensi pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik kepentingan) dan *agent* (pihak yang diberi mandat untuk menjalankan tugas). Dalam penelitian ini, pemerintah bertindak sebagai *agent* yang bertugas menyediakan layanan pemerintahan berbasis digital, sedangkan masyarakat berperan sebagai *principal* yang memiliki kepentingan dalam transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas layanan publik.

Konflik agensi dapat muncul ketika pemerintah tidak sepenuhnya melaksanakan tugasnya dalam meningkatkan partisipasi digital masyarakat, baik karena adanya keterbatasan sumber daya, regulasi yang tidak memadai, atau kepentingan politik tertentu. Untuk mengurangi masalah agensi ini, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat seperti pengendalian korupsi, supremasi hukum, dan efektivitas pemerintahan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat (Setiawan et al., 2022). Penelitian ini akan menguji bagaimana faktor-faktor tata kelola pemerintahan yang berhubungan dengan teori agensi, seperti pengendalian korupsi, supremasi hukum, efektivitas pemerintahan, dan kebebasan berpendapat, serta sumber daya manusia dan infrastruktur telekomunikasi

dapat berkontribusi terhadap tingkat e-partisipasi dan bagaimana pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam era digital.

2.1.2. E-Partisipasi

Menurut *United Nations E-Government Survey* (2022), e-partisipasi mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyediaan layanan publik. *United Nations* mengeluarkan *E-Participation Index* yang mengukur seberapa banyak suatu negara menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan keterlibatan warganya dalam pemerintahan. Menurut (Pebriyanto et. al, 2024) e-partisipasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan. E-partisipasi dibagi ke dalam tiga tingkatan utama yaitu, e-informasi, e-konsultasi, dan e-keputusan. Tingkat keterlibatan ini dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, regulasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2.1.3. Worldwide Governance Indicators (WGI)

Worldwide Governance Indicators (WGI) dibuat oleh *World Bank* untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan diberbagai negara. Respondennya terdiri dari pakar, perusahaan, dan warga negara di negara-negara industri dan berkembang (Kaufmann, 2010). Indikator WGI yang digunakan di dalam penelitian ini ada empat yaitu:

a. Pengendalian Korupsi (COC)

Pengendalian Korupsi menggambarkan sejauh mana kekuasaan publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk korupsi skala kecil maupun besar, serta dominasi negara oleh elit dan kepentingan swasta (*The WGI*, 2022) Korupsi yang tinggi menghambat pembangunan infrastruktur digital dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap platform *e-government*.

b. Supremasi Hukum (ROL)

Supremasi Hukum menunjukkan persepsi tentang sejauh mana agen memiliki kepercayaan dan kepatuhan terhadap aturan masyarakat, termasuk efektivitas penegakan kontrak, perlindungan hak milik, kinerja kepolisian dan pengadilan, serta tingkat resiko kejahatan dan kekerasan (*The WGI, 2022*). Studi oleh (Bertot et al., 2010) menunjukkan bahwa keterbukaan hukum dan transparansi kebijakan berkontribusi terhadap e-partisipasi.

c. Efektivitas Pemerintah (GEV)

Efektivitas Pemerintahan menggambarkan persepsi mengenai mutu pelayanan publik, kompetensi aparatur negara serta independensinya dari pengaruh politik, efektivitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta keandalan pemerintah dalam menjalankan komitmennya terhadap kebijakan tersebut (*The WGI, 2022*).

d. Kebebasan Berpendapat (VOA)

Menggambarkan persepsi tentang sejauh mana warga suatu negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemerintah, serta menikmati kebebasan berekspresi, berserikat, dan kebebasan pers (*The WGI, 2022*). Kebebasan politik mendukung peningkatan e-partisipasi, karena mendorong masyarakat untuk lebih aktif menyuarakan pendapatnya melalui platform digital (*Freedom House, 2021*).

2.1.4. *E-Government Development Index (EGDI)*

E-Government Development Index (EGDI) merupakan indikator yang dikembangkan dalam *United Nations (UN)*, *E-Government Survey* digunakan untuk mengukur tingkat adopsi dan implementasi teknologi dalam sistem pemerintahn suatu negara. EGDI terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *Online Service Index (OSI)*, *Telecommunication Infrastructure Index (TII)*, dan *Human Capital Index (HCI)* (*United*

Nations, 2022). Pada penelitian ini hanya berfokus pada dua komponen EDGI, yakni *Telecommunication Infrastructure Index* dan *Human Capital Index*.

a. Infrastruktur Telekomunikasi (TI)

Mengacu pada ketersediaan dan kemudahan akses terhadap infrastruktur telekomunikasi yang mendukung penerapan pemerintahan digital, yang mencakup akses internet, jumlah pengguna *broadband*, kepemilikan perangkat digital, serta keberlanjutan jaringan telekomunikasi (United Nations, 2022). Infrastruktur Telekomunikasi diukur melalui *Telecommunication Infrastructure Index* (TII), yang merupakan bagian dari EGDI untuk mendukung layanan digital pemerintahan. Indikator dalam TII meliputi jumlah pengguna internet, pelanggan *broadband* tetap dan seluler, pengguna komputer, serta pelanggan telepon tetap per 100 penduduk. Semakin tinggi nilai TII suatu negara, semakin baik kesiapan telekomunikasinya dalam mendukung e-partisipasi dan layanan digital pemerintah (United Nations, 2022).

b. Sumber Daya Manusia (HUC)

Sumber Daya Manusia dalam konteks pemerintahan digital merujuk pada kemampuan sumber daya manusia suatu negara dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang mencakup tingkat pendidikan, keterampilan digital, serta akses terhadap sumber daya pendidikan untuk mendukung literasi digital (United Nations, 2022). *Human Capital Index* (HCI), yang merupakan bagian dari EGDI, mengukur kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan *e-government* dengan indikator seperti tingkat melek huruf orang dewasa, rata-rata lama pendidikan, angka partisipasi dalam pendidikan tinggi, dan tingkat literasi digital. Negara dengan nilai HCI yang tinggi cenderung memiliki

masyarakat yang lebih siap dalam menggunakan layanan digital pemerintah dan berpartisipasi dalam kebijakan publik secara daring (*United Nations*, 2022).

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang relevan telah disajikan dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
1	Lee-geiller (2024)	Variabel Dependen: <i>E-Participation Index</i> (EPI) Variabel Independen: Kondisi Demografis, Kondisi Politik, Kondisi Keamanan, Kondisi Administratif, Kondisi Sosial Ekonomi. Variabel Mediasi: Infrastruktur Telekomunikasi	Kesiapan e-partisipasi tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada tata kelola yang baik dan keberagaman demografis. Faktor utama adalah kontrol korupsi, supremasi hukum, efektivitas pemerintahan, kebebasan berpendapat, dan infrastruktur telekomunikasi.
2	Nur et al., (2024)	Variabel Dependen: <i>E-Government Development Index</i> (EGDI) dan <i>World Governance Indicator</i> (WGI) Variabel Independen: Kebebasan Berpendapat, <i>Political Stability</i> , Efektivitas Pemerintah,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks perkembangan e-government di Thailand dan beberapa negara ASEAN sangat dipengaruhi oleh enam indikator WGI. Thailand berada di posisi menengah dalam penerapan e-government dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Faktor politik dan sosial berperan penting dalam

		<i>Regulatory Quality, Supremasi Hukum, Pengendalian Korupsi</i>	keberhasilan implementasi e-government.
3	Mao et al., (2024)	Variabel independen: <i>E-Participation</i> (E- Informasi, E- Konsultasi, E- Keputusan) Variabel Dependen: Kebebasan Berpendapat(VA) Variabel Kontrol: <i>Human Capital Index</i> (HCI), <i>Telecommunication Infrastructure Index</i> (TII), GDP per capita	E-Participation berpengaruh positif terhadap Kebebasan Berpendapat, dengan dampak lebih besar di negara berkembang dibanding negara maju.
4	Waheduzzaman & Khandaker, (2022)	Variabel Dependen: <i>Voice and Accountability, Corruption Perception, Government Effectiveness</i> Variabel Independen: <i>E-Participation.</i>	<i>E-Participation</i> berhubungan signifikan antara E-Participation dan Voice and Accountability. <i>E-Participation</i> dapat membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan efektivitas pemerintah, tetapi kurang efektif dalam memastikan akuntabilitas penyedia layanan publik.
5	Merhi & Ahluwalia, (2024)	Variabel Independen: <i>E-Participation, Human Capital, Corruption-Free, Telecommunication Infrastructure, Online Service.</i> Variabel dependen: <i>Environmental Performance</i> (EPI - <i>Environmental</i>	E-Participation meningkatkan Sumber Daya Manusia dan mengurangi korupsi, yang berpengaruh positif terhadap Environmental Performance. Sumber Daya Manusia berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Environmental Performance. Korupsi berdampak negatif terhadap Sumber Daya Manusia dan Environmental

		<p><i>Performance Index</i>)</p> <p>Variabel Kontrol: GDP per Capita, Population Density.</p>	<p>Performance.</p> <p>Infrastruktur telekomunikasi dan layanan online mendukung E-Participation dan berdampak pada Environmental Performance</p>
6	Pebriyanto et al., (2024)	<p>Variabel Independen: <i>E-Participation</i> (LAPOR! E-Musrenbang)</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Kebijakan Publik</p> <p>Variabel Kontrol: Akses Internet, Literasi Digital, Koordinasi Birokrasi</p>	<p>E-Participation meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas kebijakan publik, tetapi efektivitasnya masih terbatas.</p> <p>Tantangan utama: ketimpangan akses internet, rendahnya literasi digital, resistensi birokrasi.</p> <p>Koordinasi antarinstansi dalam mengelola platform digital masih belum optimal. Diperlukan peningkatan infrastruktur digital, literasi digital, serta mekanisme umpan balik yang lebih transparan.</p>
7	Agbozo & Asamoah, (2019)	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas Pemerintah (<i>Government Effectiveness</i>) 2. Pengendalian Korupsi (<i>Control of Corruption</i>) <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-Government Development Index</i> (EGDI) 2. Supremasi Hukum (<i>Rule of Law</i>) 	<p>Pengembangan e-government berkontribusi positif terhadap efektivitas pemerintahan dan pengendalian korupsi. Negara dengan tingkat e-government yang lebih tinggi memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Kepatuhan terhadap aturan hukum memperkuat efektivitas e-government dalam mengurangi korupsi.</p>

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Pengendalian Korupsi terhadap tingkat E-Partisipasi

Korupsi merupakan salah satu hambatan utama dalam terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ketika tingkat korupsi dalam suatu negara tinggi, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan enggan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk melalui platform digital (*e-participation*). Sebaliknya, jika pemerintah berhasil mengendalikan korupsi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, maka kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah akan meningkat. Dengan adanya kepercayaan yang lebih tinggi, warga negara akan lebih cenderung menggunakan layanan *e-government* untuk menyampaikan aspirasi mereka, memberikan umpan balik terhadap kebijakan, serta ikut serta dalam berbagai inisiatif digital yang diselenggarakan oleh pemerintah (Lupu & Lazar, 2015).

Dalam perspektif *Agency Theory*, ketika korupsi merajalela, terjadi masalah keagenan di mana pemerintah dapat bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan demi kepentingan masyarakat luas. Hal ini menciptakan asimetri informasi yang menghambat keterlibatan publik dalam pemerintahan digital. Oleh karena itu, pengendalian korupsi menjadi mekanisme penting dalam mengurangi *agency problem* dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam layanan digital pemerintah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengendalian korupsi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan *e-participation*. (Bertot, 2010) menekankan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menjadi alat penting dalam memerangi korupsi dengan menyediakan platform bagi warga negara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik secara lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, penelitian (Waheduzzaman dan

Khandaker, 2022) menemukan bahwa negara-negara dengan indeks korupsi yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat *e-participation* yang lebih tinggi, karena warganya merasa lebih percaya terhadap sistem pemerintahan digital yang disediakan. (Islam dan Khadem, 2021) menyoroti bahwa *e-government* dapat digunakan sebagai sarana untuk mengurangi korupsi melalui peningkatan transparansi dalam administrasi publik, yang pada akhirnya mendorong partisipasi aktif warga negara dalam sistem pemerintahan berbasis digital. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat *e-government* development dan efektivitas pengendalian korupsi terhadap peningkatan *e-participation*. Berdasarkan hal ini di dapat hipotesis:

H1: Pengendalian Korupsi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat E-Partisipasi

2.3.2. Pengaruh Supremasi Hukum terhadap tingkat E-Partisipasi

Kepastian hukum atau supremasi hukum merupakan faktor penting dalam mendorong partisipasi warga negara dalam pemerintahan digital. Supremasi hukum mengacu pada penerapan hukum yang konsisten, adil, dan dapat diandalkan, termasuk dalam perlindungan hak-hak warga negara dalam ruang digital (Bannister & Connolly, 2011). Ketika sistem hukum suatu negara kuat, warga akan merasa lebih aman untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik melalui platform digital (*e-participation*) (Kim et al., 2021). Supremasi hukum yang kuat juga mencegah tindakan represif terhadap kebebasan berekspresi dan menjamin bahwa aspirasi publik dapat diterima tanpa konsekuensi negatif (Jaeger & Bertot, 2010). Dalam konteks *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976), hubungan antara warga negara (*principal*) dan pemerintah (*agent*) sering kali menghadapi masalah asimetri informasi dan potensi *moral hazard* (Cordella & Bonina, 2012). Ketika supremasi hukum ditegakkan secara konsisten, mekanisme pengawasan terhadap

pemerintah menjadi lebih kuat, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh *agent* (pemerintah) (Nam et al., 2018). Keberadaan hukum yang jelas dan penegakan hukum yang efektif akan memastikan bahwa kebijakan digital pemerintah tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas (Dawes et al., 2008).

Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, warga negara memiliki jaminan bahwa partisipasi mereka dalam *e-government* tidak akan menimbulkan konsekuensi negatif, seperti kriminalisasi pendapat atau penyalahgunaan data pribadi (Smith et al., 2020). Perlindungan hukum yang kuat terhadap kebebasan berekspresi dan keamanan data pribadi akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong keterlibatan warga dalam berbagai bentuk *e-participation*, termasuk memberikan umpan balik kebijakan, berpartisipasi dalam petisi digital, atau menggunakan sistem pelaporan publik berbasis teknologi (Kim et al., 2021). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan indeks supremasi hukum yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat *e-participation* yang lebih besar karena warganya merasa lebih percaya untuk menggunakan layanan digital pemerintah tanpa takut akan penyalahgunaan kekuasaan (Sourbati & Behrendt, 2021). Maka dari itu, hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Supremasi Hukum memiliki pengaruh positif terhadap tingkat E-Participation

2.3.3. Pengaruh Efektivitas Pemerintah terhadap tingkat E-Partisipasi

Efektivitas pemerintahan merupakan ukuran sejauh mana pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang berkualitas, mengelola sumber daya dengan efisien, serta merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat (Kaufmann, Kraay, &

Mastruzzi, 2011). Pemerintahan yang efektif memainkan peran penting dalam mengurangi asimetri informasi dalam *Agency Theory*, di mana pemerintah yang responsif dan efisien dapat meningkatkan kepercayaan publik serta meminimalkan ketidakpastian dalam interaksi digital antara masyarakat dan pemerintah (Janssen & van der Voort, 2016). Ketika pemerintah mampu menyediakan layanan publik yang transparan, dapat diakses dengan mudah, serta memiliki sistem yang responsif terhadap kebutuhan warga, maka kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan digital meningkat, yang pada akhirnya mendorong *e-participation* (Sourbati & Behrendt, 2021).

Efektivitas pemerintahan juga berperan dalam memastikan bahwa sistem *e-government* berjalan dengan optimal. Pemerintah yang memiliki kapasitas tata kelola yang baik cenderung mampu mengimplementasikan layanan digital yang lebih baik dan memastikan bahwa teknologi yang digunakan benar-benar mendukung kebutuhan warga negara (Wirtz & Birkmeyer, 2018). Ketika pemerintah gagal dalam menyediakan layanan yang efektif, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap *e-government* dan cenderung enggan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif digital (Welch et al., 2005). Sebaliknya, negara yang memiliki pemerintahan yang efektif dapat meningkatkan *e-participation* dengan menyediakan layanan digital yang mudah diakses, responsif, dan bermanfaat bagi warga negara (Bolívar et al., 2016).

Selain itu, efektivitas pemerintahan juga dapat mengurangi risiko *moral hazard*, yaitu ketika pemerintah tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian dalam interaksi digital (Bannister & Connolly, 2011). Pemerintah yang efektif dapat memastikan bahwa layanan digital yang tersedia tidak hanya sekadar alat komunikasi satu arah, tetapi juga sarana bagi warga negara

untuk memberikan masukan yang benar-benar diperhitungkan dalam proses pengambilan kebijakan (Kim et al., 2021). Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pemerintahan berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam platform digital pemerintah (Agbozo & Asamoah, 2019). Dengan didukung oleh penelitian terdahulu yang dicantumkan, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Efektivitas Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat E-Partisipasi

2.3.4. Pengaruh Kebebasan Berpendapat terhadap tingkat E-Partisipasi

Kebebasan Berpendapat mengacu pada sejauh mana warga negara memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapat mereka, serta adanya mekanisme akuntabilitas dalam pemerintahan yang memungkinkan warga untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah (Norris et al., 2017). Negara dengan tingkat Kebebasan Berpendapat yang tinggi cenderung lebih demokratis dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk melalui platform digital (*e-participation*) (Bannister & Connolly, 2014). Kebebasan berpendapat dapat mengurangi asimetri informasi dengan memberikan ruang bagi warga untuk mengkritisi kebijakan, menyampaikan aspirasi, serta menuntut transparansi dari pemerintah (Meijer, 2015).

Ketika kebebasan ini dijamin, warga memiliki lebih banyak insentif untuk berpartisipasi dalam *e-government* karena mereka merasa bahwa suara mereka memiliki dampak nyata terhadap kebijakan publik (Bertot et al., 2012). Dalam konteks *agency theory*, kebebasan berpendapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial

yang membatasi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dengan memastikan bahwa mereka tetap bertanggung jawab kepada publik (Janssen et al., 2016). Ketika warga memiliki akses terhadap informasi dan ruang diskusi yang bebas, partisipasi mereka dalam layanan digital pemerintah cenderung meningkat, karena mereka dapat mengakses informasi kebijakan, mengkritisi keputusan pemerintah, serta memberikan umpan balik secara langsung melalui platform digital (Mao et al., 2024).

Selain itu, kebebasan berpendapat yang tinggi juga berkontribusi pada penguatan demokrasi digital, di mana warga negara merasa lebih aman dalam menyampaikan aspirasi mereka tanpa takut akan represi atau sensor dari pemerintah (Meijer et al., 2017). Studi yang dilakukan oleh (Nam et al., 2012) menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebebasan sipil yang lebih tinggi memiliki tingkat *e-participation* yang lebih besar, karena warga negara lebih percaya bahwa partisipasi mereka akan berdampak pada kebijakan publik. Hal ini diperkuat oleh penelitian oleh (Welp & Breuer, 2021), yang menemukan bahwa kebebasan berpendapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan partisipasi digital di negara berkembang, di mana warga negara sering kali mengandalkan media digital untuk mengekspresikan pandangan politik mereka dan mempengaruhi kebijakan publik. Dengan didukung oleh penelitian terdahulu yang dicantumkan, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: Kebebasan Berpendapat memiliki pengaruh positif terhadap tingkat E-Partisipasi

2.3.5. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap tingkat E-Partisipasi

Sumber Daya Manusia mengacu pada tingkat pendidikan, keterampilan, dan literasi digital warga negara, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk

mengakses dan menggunakan layanan *e-government* secara efektif (Bannister & Connolly, 2019). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar kemungkinan mereka memiliki pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pemerintahan digital dan bagaimana cara melakukannya (Zuiderwijk et al., 2015). Selain itu, literasi digital juga menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa warga negara dapat memahami, navigasi, dan memanfaatkan platform digital pemerintah secara optimal (Van Deursen & Helsper, 2015). (Bannister dan Connolly, 2019) menekankan bahwa keberhasilan implementasi *e-government* sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi, yang berkaitan erat dengan tingkat sumber daya manusia yang dimiliki. Jika warga memiliki keterampilan digital yang baik, mereka akan lebih mudah mengakses informasi kebijakan, menyampaikan aspirasi, serta memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap pengambilan keputusan pemerintah (Piller et al., 2019). Dalam konteks *agency theory*, pemerintah yang berperan sebagai *agent* lebih mungkin bertindak akuntabel ketika warga memiliki kapasitas yang cukup untuk memantau dan menilai kebijakan yang diimplementasikan melalui layanan digital (Cordella & Bonina, 2012).

Selain itu, tingkat sumber daya manusia yang tinggi juga berkaitan dengan kesiapan individu dalam menggunakan teknologi sebagai alat partisipasi politik. Research oleh (Reddick et al., 2020) menemukan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam menggunakan layanan *e-government* untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini juga diperkuat oleh temuan (Bertot et al., 2016), yang menyatakan bahwa literasi digital yang baik meningkatkan kepercayaan terhadap sistem digital pemerintah dan memperbesar kemungkinan warga negara untuk berpartisipasi dalam *e-participation*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya

manusia berperan sebagai faktor kunci dalam memperkuat efektivitas *e-participation* dengan memastikan bahwa warga negara dapat menggunakan layanan *e-government* secara maksimal.

H5: Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap tingkat E-Partisipasi

2.3.6. Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi terhadap tingkat E-Partisipasi

Infrastruktur telekomunikasi merupakan faktor teknis yang sangat penting dalam menentukan tingkat partisipasi warga dalam *e-government* (Kim et al., 2016). Tanpa infrastruktur digital yang memadai, seperti akses internet yang stabil dan perangkat yang mendukung, masyarakat akan kesulitan untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif *e-government* (Wirtz et al., 2018). Akses internet yang merata tidak hanya memungkinkan warga untuk terhubung dengan layanan digital pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat memperoleh informasi publik dengan mudah dan menyampaikan pendapat mereka dalam forum daring (Lee-Geiller, 2024). Studi yang dilakukan oleh (Kim et al., 2016) menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang baik meningkatkan partisipasi warga dalam berbagai platform digital pemerintah. Ketika infrastruktur digital tersedia secara luas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, warga negara memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh informasi tentang kebijakan publik, menyampaikan aspirasi mereka, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara daring (Bannister & Connolly, 2019). Infrastruktur telekomunikasi yang memadai juga mendukung pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan menyediakan sarana komunikasi yang lebih efektif antara warga dan institusi negara (Zuiderwijk et al., 2015).

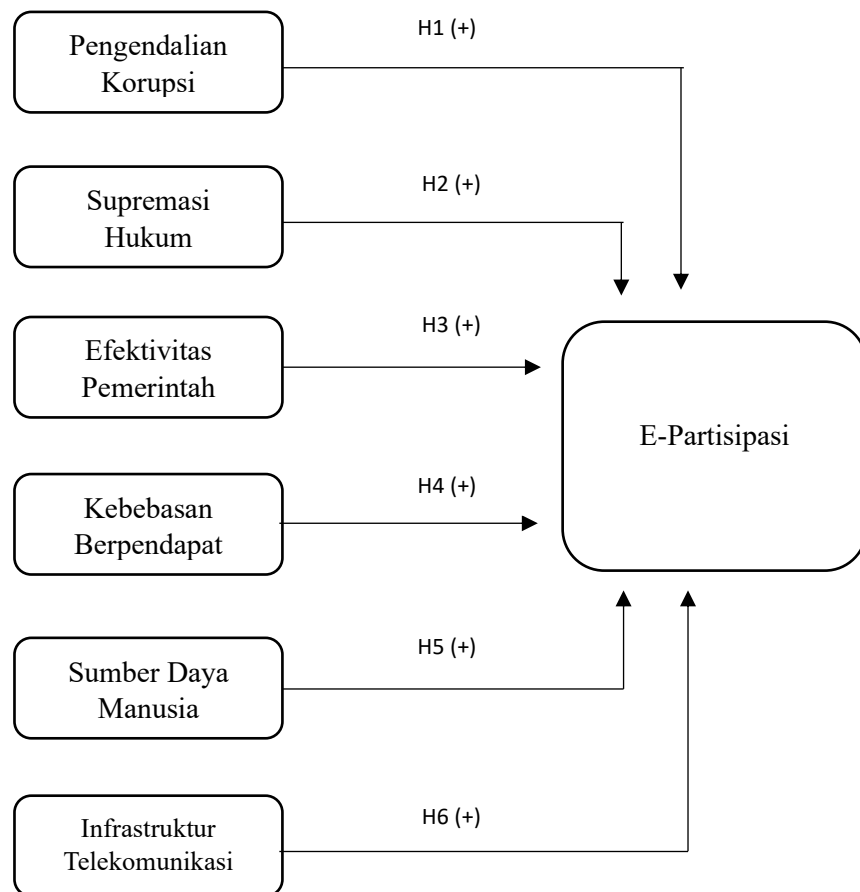
Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang baik juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi *e-participation* dengan mengurangi kesenjangan digital (Van Dijk, 2020). Negara dengan sistem telekomunikasi yang lebih maju cenderung memiliki tingkat *e-participation* yang lebih tinggi karena masyarakatnya memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi informasi dan komunikasi (Wirtz et al., 2018). Studi oleh (Lee-Geiller, 2024) menegaskan bahwa kesiapan *e-participation* bergantung pada infrastruktur teknologi, yang mencakup cakupan internet, kapasitas jaringan, serta aksesibilitas platform digital pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik infrastruktur telekomunikasi suatu negara, semakin besar kemungkinan warga negara untuk berpartisipasi dalam *e-government*.

H6: Infrastruktur Telekomunikasi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat E-Partisipasi

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis yang telah dijelaskan diatas, diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini merupakan pendekatan ilmiah yang bersifat sistematis dan berbasis sains, dimana penelitian dilakukan dengan mengamati populasi atau sampel tertentu, menggunakan instrumen penelitian yang sesuai, serta menganalisis data berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang konkret, empiris, objektif, terukur, rasional dan terstruktur. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel yang mengkombinasikan data *cross-sectional* dan *time-series*, dengan cakupan 47 negara di Asia berdasarkan laporan *United Nations (UN) E-Government Survey* periode 2010–2020. Mengingat UN hanya melakukan survei setiap dua tahun sekali, penelitian ini menggunakan data dari enam periode survei. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari *United Nations (UN) E-Government Survey* dan *Worldwide Governance Indicators (WGI)*, di mana dari UN diperoleh data mengenai e-partisipasi, Infrastruktur Telekomunikasi, dan Sumber Daya Manusia, sedangkan dari WGI diperoleh indikator Pengendalian Korupsi, Supremasi Hukum, Efektivitas Pemerintah, serta Kebebasan Berpendapat. Analisis dilakukan untuk menguji bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kesiapan e-partisipasi dalam pemerintahan di negara-negara Asia.

3.2. Definisi dan Pengukuran Variabel

3.2.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah E-Partisipasi atau partisipasi elektronik merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan melalui teknologi digital. E-Partisipasi menunjukkan sejauh mana warga negara menggunakan layanan digital untuk berinteraksi dengan pemerintah dalam pembuatan kebijakan, penyampaian aspirasi, dan pengambilan keputusan. E-partisipasi diukur menggunakan *E-Participation Index* (EPI) yang merupakan bagian dari *E-Government Development Index* (EGDI) yang diterbitkan *United Nations* (UN E-Government Survey). EPI memiliki tiga komponen utama yaitu, E-Information, E-Consultation, dan E-Decision Making.

3.2.2. Variabel Independen

3.2.2.1. Pengendalian Korupsi (COC)

Pengendalian Korupsi merujuk pada sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk keuntungan pribadi, termasuk bentuk-bentuk korupsi kecil dan besar, serta bagaimana sistem pemerintahan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Negara dengan kontrol korupsi yang baik umumnya memiliki tingkat kepercayaan public yang lebih tinggi terhadap pemerintah, sehingga mendorong partisipasi elektronik. Variabel ini diukur menggunakan *Control of Corruption Index* dari *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang dikembangkan oleh *World Bank*. Nilainya berkisar antara -2,5 (kontrol korupsi rendah) hingga +2,5 (kontrol korupsi tinggi).

3.2.2.2. Supremasi Hukum (ROL)

Supremasi Hukum mengacu pada tingkat kepercayaan individu dan institusi terhadap sistem hukum serta kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku di suatu negara.

Konsep ini juga mencakup efektivitas sistem peradilan, kinerja aparat kepolisian, serta tingkat kriminalitas dan korupsi. Variabel ini diukur menggunakan *Rule of Law Index* (ROL) yang merupakan bagian dari *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang dikembangkan oleh *World Bank*. Indeks ini memiliki rentang nilai dari -2,5, yang menunjukkan supremasi hukum yang sangat lemah, hingga +2,5, yang mencerminkan supremasi hukum yang sangat kuat

3.2.2.3. Efektivitas Pemerintah (GOV)

Efektivitas Pemerintah mengukur sejauh mana kualitas layanan publik, tingkat profesionalisme aparatur negara, serta efektivitas kebijakan dalam mengelola pemerintahan. Negara dengan tingkat efektivitas pemerintahan yang lebih tinggi umumnya memiliki sistem yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Variabel ini diukur melalui *Government Effectiveness Index* (GEI) yang merupakan bagian dari *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang dikembangkan oleh *World Bank*. Indeks ini memiliki skala antara -2,5, yang menunjukkan efektivitas pemerintahan yang sangat rendah, hingga +2,5, yang mencerminkan efektivitas pemerintahan yang sangat tinggi

3.2.2.4. Kebebasan Berpendapat (VOA)

Kebebasan Berpendapat dan akuntabilitas mencerminkan sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam memilih pemerintah mereka, serta tingkat kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat di suatu negara. Negara dengan tingkat *Kebebasan Berpendapat* yang tinggi umumnya memiliki masyarakat yang lebih aktif dalam *e-participation*. Variabel ini diukur menggunakan *Voice and Accountability Index* (VAI) dari *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang juga dikembangkan oleh *World Bank*. Nilainya berkisar antara -2,5 (kebebasan rendah) hingga +2,5 (kebebasan tinggi).

3.2.2.5.Sumber Daya Manusia (HUC)

Sumber Daya Manusia atau modal manusia merujuk pada kualitas sumber daya manusia yang mencerminkan tingkat pendidikan, keterampilan, dan kesehatan penduduk suatu negara. Sumber daya manusia berperan krusial dalam meningkatkan produktivitas serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital dan e-participation. Variabel ini diukur melalui *Sumber Human Capital Index* (HCI) yang dikembangkan oleh *World Bank*, dengan penilaian berdasarkan beberapa faktor, seperti harapan lama sekolah, tingkat literasi, dan angka harapan hidup sejak lahir. Skala HCI berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas modal manusia yang lebih baik dan kesiapan yang lebih tinggi dalam memanfaatkan teknologi di suatu negara.

3.2.2.6.Infrastruktur Telekomunikasi (TI)

Infrastruktur Telekomunikasi diukur menggunakan *Telecommunication Infrastructure Index (TII)*, yang ditentukan berdasarkan lima indikator utama, yaitu jumlah komputer (PC), jumlah pengguna internet, ketersediaan jaringan telepon, jumlah pengguna layanan telepon seluler, serta jumlah pelanggan internet broadband. TII memiliki rentang skala antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik di suatu negara.

3.3. Analisis Data

3.3.1. Model Regresi Data

3.3.1.1.Common Effect Model (CEM)

Model *Common Effect* atau *Pooled Ordinary Least Squares (Pooled OLS)* berasumsi bahwa setiap individu dan periode waktu dalam data panel tidak memiliki karakteristik yang berbeda. Model ini menganggap semua unit observasi bersifat homogen tanpa

mempertimbangkan efek khusus dari individu maupun waktu. Oleh karena itu, estimasi dilakukan menggunakan metode regresi OLS standar (Asteriou & Hall, 2021).

3.3.1.2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model Fixed Effect mempertimbangkan adanya karakteristik unik pada setiap individu yang tetap konstan sepanjang waktu. Model ini mengendalikan faktor-faktor yang tidak teramati namun berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga mampu memberikan estimasi yang lebih akurat dibandingkan dengan *Common Effect Model* (CEM) (Hsiao, 2022).

3.3.1.3. *Random Effect Model* (REM)

Model Random Effect berasumsi bahwa variasi antarunit observasi terjadi secara acak dan tidak memiliki korelasi dengan variabel independen. Dalam model ini, efek individu tidak dimodelkan secara eksplisit, melainkan dimasukkan sebagai bagian dari error term (Asteriou & Hall, 2021).

3.3.2. Uji Estimasi Model

3.3.2.1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* lebih sesuai dibandingkan *Common Effect*, yang mengasumsikan bahwa tidak terdapat perbedaan karakteristik baik antar individu maupun antar periode waktu.

3.3.2.2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM). Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah perbedaan antarindividu dalam data panel bersifat tetap atau acak

3.3.2.3. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk membandingkan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Random Effect Model* (REM)

Tabel 3. 1 Kriteria Pemilihan Model

Pengujian	Hasil	Keputusan
Uji Chow	H0 = Prob. > 0,05 H1 = Prob. < 0,05	CEM FEM
Uji Hausman	H0 = Prob. > 0,05 H1 = Prob. < 0,05	REM FEM
Uji Lagrange Multiplier	H0 = Prob. > 0,05 H1 = Prob. < 0,05	CEM REM

Jika model yang terpilih pada Uji Chow adalah *Common Effect Model* (CEM) maka Uji Hausman tidak perlu dilakukan, tetapi jika yang terpilih pada Uji Chow adalah *Fixed Effect Model* (FEM) maka Uji Hausman tetap harus dilakukan (Napitupulu et al., 2021)

3.3.3. Uji Asumsi Klasik

3.3.3.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan linear yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Keberadaan multikolinearitas dapat menyebabkan estimasi regresi menjadi tidak stabil serta menyulitkan interpretasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Multikolinearitas dapat dideteksi melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang lebih dari 10, menandakan tingkat multikolinearitas yang tinggi, serta nilai korelasi antar variabel independen yang melebihi 0,85, yang juga menunjukkan kemungkinan adanya multikolinearitas (Napitupulu et al., 2021: 141).

3.3.4. Uji Hipotesis

3.3.4.1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Kriteria keputusan: jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} < 0,05$, maka tolak H_0 , yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} \geq 0,05$, maka terima H_0 , yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.3.4.2. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Kriteria keputusan: jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} < 0,05$, maka tolak H_0 , artinya variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan. Sebaliknya, jika $F\text{-hitung} \leq F\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} \geq 0,05$, maka terima H_0 , yang berarti tidak ada pengaruh signifikan secara simultan.

3.3.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Gambar 3. 1 Rumus Adjusted R^2

$$\text{Adjusted } R^2 = 1 - \left(\frac{(1 - R^2) \times (n - 1)}{n - k - 1} \right)$$

Uji koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana R^2 mendekati 1 menunjukkan kemampuan prediksi yang tinggi, sedangkan R^2 mendekati 0 menunjukkan sebaliknya. Adjusted R^2 digunakan untuk

mengatasi kelemahan R^2 , yang cenderung meningkat seiring bertambahnya variabel independen, meskipun tidak semuanya berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, Adjusted R^2 lebih akurat dalam menilai kualitas model karena mempertimbangkan jumlah variabel independen yang digunakan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan dari data *time series* dan *cross section* tahun 2010-2020 tetapi yang digunakan hanya data tahun 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, dan 2020 dikarenakan *United Nations* mengeluarkan data setiap 2 tahun sekali. Menggunakan data dari 47 negara di Asia yang merupakan kombinasi dari data *United Nations* dan *Worldwide Governance Indicators*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari Pengendalian Korupsi (X1), Supremasi Hukum (X2), Efektivitas Pemerintah (X3), Kebebasan Berpendapat (X4), Sumber Daya Manusia (X5), dan Infrastruktur Telekomunikasi (X6) terhadap variabel dependen yaitu E-Partisipasi (Y) di negara Asia. Data diteliti menggunakan Stata 17 dengan metode regresi data panel.

4.2. Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Keterangan	COC	ROL	GEV	VOA	HUC	TI	EPT
Mean	-0,32479	-0,29894	-0,08191	-89,999	0,60212	0,38886	18,239
Maximum	2,17	1,87	2,32	1041	0,956	0,9684	5000
Minimum	-1,72	-2,07	-2,35	-2086	0	0	0
Std. Dev.	0,89704	0,86812	0,90754	365,76	0,23602	0,24191	297,72
Observation	282	282	282	282	282	282	282

Sumber: hasil output Stata 17, 2025

Keterangan: COC: Pengendalian Korupsi; ROL: Supremasi Hukum; GEV: Efektivitas Pemerintah; VOA: Kebebasan Berpendapat; HUC: Sumber Daya Manusia; TI: Infrastruktur Telekomunikasi; EPT: E-Partisipasi

Pada tabel 4.1 dijelaskan hasil dari analisis statistik deskriptif pada variabel independen Pengendalian Korupsi (COC) mempunyai nilai minimum -1,72 yang

diperoleh negara Republik Syrian Arab pada tahun 2020 dan nilai maksimumnya berada pada angka 2,17 yang diperoleh negara Singapura pada tahun 2010 dan 2018. Nilai rata-rata pengendalian korupsi (COC) periode 2010-2020 dari 282 observasi adalah -0,32479 dan standar deviasinya sebesar 0,89704.

Supremasi Hukum (ROL) memiliki nilai minimum sebesar -2,07, yang tercatat pada negara Republik Syrian Arab pada tahun 2020, sedangkan nilai maksimumnya mencapai 1,87 yang diperoleh oleh negara Singapura pada tahun 2020 yang menandakan memiliki supremasi hukum yang kuat. Rata-rata supremasi hukum untuk periode 2010-2020 dari 282 observasi adalah -0,29894 dengan standar deviasi sebesar 0,86812.

Efektivitas Pemerintah (GEV) menunjukkan nilai minimum sebesar -2,35 dari negara Yemen pada tahun 2020, sedangkan nilai maksimum mencapai 2,32 dari negara Singapura pada tahun 2020. Nilai rata-rata efektivitas pemerintahan selama periode penelitian adalah -0,08191 dari 282 observasi dengan standar deviasi 0,90754, yang menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam tingkat efektivitas pemerintahan di berbagai negara.

Kebebasan Berpendapat (VOA) memiliki rentang nilai yang cukup luas, dengan nilai minimum -2086 diperoleh negara Uzbekistan pada tahun 2010 dan nilai maksimum 1041 diperoleh negara Jepang pada tahun 2010. Rata-rata kebebasan berpendapat selama periode yang diamati adalah -89,999 dari 282 observasi dengan standar deviasi 365,76, yang mengindikasikan adanya perbedaan signifikan antara negara-negara dalam aspek kebebasan berekspresi.

Sumber Daya Manusia (HUC) memiliki nilai minimum sebesar 0 dari beberapa negara yaitu, Bahrain, Cyprus, Korea Utara, Israel, Jepang, Kuwait, Mongolia, Qatar, Korea Selatan, Saudi Arabia, Singapura dan United Arab Emirates pada tahun 2010

sedangkan nilai maksimum 0,956 pada negara Korea Utara tahun 2012. Nilai rata-rata sumber daya manusia dalam periode tersebut adalah 0,60212 dari 282 observasi dengan standar deviasi sebesar 0,23602, yang mencerminkan adanya kesenjangan dalam kualitas sumber daya manusia di berbagai negara.

Infrastruktur Telekomunikasi (TI) memiliki nilai minimum 0 di negara Afganistan dan Myanmar pada tahun 2012 dan maksimum 0,9684 pada negara Korea Selatan tahun 2020. Rata-rata infrastruktur telekomunikasi selama periode 2010-2020 adalah 0,38886 dari 282 observasi dengan standar deviasi 0,24191, menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dalam tingkat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.

Terakhir, variabel E-Partisipasi (EPT) menunjukkan nilai minimum sebesar 0, nilai ini diperoleh dari beberapa negara dengan tahun yang berbeda-beda yaitu, Afghanistan, Armenia, Cambodia, Korea Utara, Laos, Myanmar, Tajikistan, Turkmenistan, Yemen, sementara nilai maksimum sebesar 5000 dicapai negara Malaysia tahun 2012. Rata-rata e-partisipasi selama periode penelitian adalah 18,239 dari 282 observasi dengan standar deviasi 297,72, yang menunjukkan adanya variasi besar dalam keterlibatan digital di sektor pemerintahan di berbagai negara.

4.3. Uji Estimasi Model

4.3.1. Uji Chow

Pada hasil uji Chow, diperoleh nilai F sebesar 1,67 dengan probabilitas F sebesar 0,0078. Karena nilai probabilitas ini $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, model yang lebih sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil uji chow adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

4.3.2. Uji Hausman

Pada hasil uji Hausman, diperoleh nilai Wald $\chi^2(6)$ sebesar 13,76 dengan probabilitas sebesar 0,0325. Karena nilai probabilitas ini $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Dengan demikian, metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

Pada Uji Chow dan Uji Hausman yang dilakukan terpilih *Fixed Effect Model* (FEM) sehingga Uji Lagrange-Multiplier tidak perlu dilakukan.

4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas

	COC	ROL	GEV	VOA	HUC	TI
COC	1,0000					
ROL	0,9335	1,0000				
GEV	0,8726	0,8947	1,0000			
VOA	0,1446	0,1457	0,1485	1,0000		
HUC	0,2166	0,2464	0,2884	0,3831	1,0000	
TI	0,6075	0,6303	0,5960	0,2557	0,5133	1,0000

Sumber: Hasil output Stata 17, 2025

Keterangan: COC: Pengendalian Korupsi; ROL: Supremasi Hukum; GEV: Efektivitas Pemerintah; VOA: Kebebasan Berpendapat; HUC: Sumber Daya Manusia; TI: Infrastruktur Telekomunikasi.

Pada tabel 4.2 terdapat data yang dapat disimpulkan bahwa tidak terdeteksi adanya indikasi multikolinearitas karena semua koefisien korelasi pada semua variabel $< 0,9$. Maka variabel independen dinyatakan lulus uji multikolinearitas.

4.5. Uji Hipotesis

4.5.1. Uji t

Tabel 4. 3 Hasil Uji t

Variabel	Koefisien	Std. err.	t-statistic	Prob > t	Keterangan
COC	309,8113	177,6802	2,63	0,009	Positif Signifikan
ROL	-205,8184	92,82961	-2,22	0,028	Negatif Signifikan
GEV	-252,5037	55,84879	-4,52	0,000	Negatif Signifikan
VOA	0,0171259	0,0549143	0,31	0,755	Positif Tidak Signifikan
HUC	106,8676	100,546	1,06	0,289	Positif Tidak Signifikan
TI	-123,1162	129,2869	-0,95	0,342	Negatif Tidak Signifikan

Sumber: Hasil output Stata 17, 2025

Keterangan: COC: Pengendalian Korupsi; ROL: Supremasi Hukum; GEV: Efektivitas Pemerintah; VOA: Kebebasan Berpendapat; HUC: Sumber Daya Manusia; TI: Infrastruktur Telekomunikasi.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan hasil uji t yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel sebagai berikut:

- a. Dari hasil uji nilai t hitung variabel Pengendalian Korupsi (COC) sebesar 2,63. Nilai signifikansi ($P > |t|$) sebesar $0,009 < 0,05$. Maka, H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya hipotesis variabel Pengendalian Korupsi terhadap E-Partisipasi didukung.
- b. Dari hasil uji nilai t hitung variabel Supremasi Hukum (ROL) sebesar -2,22. Nilai signifikansi ($P > |t|$) sebesar $0,028 < 0,05$. Maka, hipotesis variabel Supremasi Hukum terhadap E-Partisipasi tidak didukung.

- c. Dari hasil uji nilai t hitung variabel Efektivitas Pemerintahan (GEV) sebesar -4,52. Nilai signifikansi ($P > |t|$) sebesar $0,000 < 0,05$. Maka, hipotesis variabel Efektivitas Pemerintahan terhadap E-Partisipasi tidak didukung.
- d. Dari hasil uji nilai t hitung variabel Kebebasan Berpendapat (VOA) sebesar 0,31. Nilai signifikansi ($P > |t|$) sebesar $0,755 > 0,05$. Maka, hipotesis variabel Kebebasan Berpendapat terhadap E-Partisipasi tidak didukung.
- e. Dari hasil uji nilai t hitung variabel Sumber Daya Manusia (HUC) sebesar 1,06. Nilai signifikansi ($P > |t|$) sebesar $0,289 > 0,05$. Maka, hipotesis variabel Sumber Daya Manusia terhadap E-Partisipasi tidak didukung.
- f. Dari hasil uji nilai t hitung variabel Infrastruktur Telekomunikasi (TI) sebesar -0,95. Nilai signifikansi ($P > |t|$) sebesar $0,342 > 0,05$. Maka, hipotesis variabel Infrastruktur Telekomunikasi terhadap E-Partisipasi tidak didukung.

Dari hasil uji pada tabel diatas juga terdapat persamaan Regresi Data Panel sebagai berikut:

$$EPT = 21,71999 + 309,8113 \text{ COC} - 205,8184 \text{ ROL} - 252,5037 \text{ GEV} + 0,0171259 \text{ VOA} + 106,8676 \text{ HUC} - 123,1162 \text{ TI}$$

4.5.2. Uji F

Berdasarkan hasil uji F, nilai F hitung sebesar 6,19 dan nilai sig. $0,0000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya model penelitian tepat untuk dilakukan dan variabel Pengendalian Korupsi, Supremasi Hukum, Efektivitas Pemerintah, Kebebasan Berpendapat, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Telekomunikasi berpengaruh signifikan terhadap E-Partisipasi.

4.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared:	
Within	= 0,1396
Between	= 0,0294
Overall	= 0,0171

Sumber: Hasil output Stata 17, 2025

Pada tabel 4.4 ditunjukkan nilai *R-Squared*, tetapi dalam tabel tersebut tidak memiliki nilai *Adjusted R-Square*. Namun, nilai *adjusted r-square* dapat dihitung menggunakan rumus yang telah dicantumkan pada gambar 3.1 dengan data berikut:

$R^2_{within} = 0,1396$ (karena ini adalah *Fixed Effect Model* maka yang digunakan *within R-Squared*)

$n = 282$ (jumlah observasi)

$k = 6$ (jumlah variabel independen)

Maka, berdasarkan perhitungan *Adjusted R-Squared* adalah 0,1208 atau 12,08% ini berarti menunjukkan variabel independen yang terdiri Pengendalian Korupsi, Supremasi Hukum, Efektivitas Pemerintah, Kebebasan Berpendapat, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Telekomunikasi mampu menjelaskan variabel dependen E-Partisipasi sebesar 12,08% dan sisanya sebesar 87,92% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

4.6. Pembahasan

4.6.1. Pengaruh Pengendalian Korupsi terhadap E-Partisipasi

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel Pengendalian Korupsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap E-Partisipasi, dengan nilai t-hitung 2,63 dan probabilitas 0,009 ($< 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik pengendalian korupsi dalam suatu negara, semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam *e-government*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Agbozo & Asamoah, 2019) yang menyatakan bahwa pengurangan tingkat korupsi

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik melalui platform digital. Ketika pemerintah berhasil menerapkan kebijakan anti korupsi yang efektif, seperti transparansi anggaran, pengawasan publik, dan mekanisme pelaporan yang jelas, maka masyarakat lebih terdorong untuk memanfaatkan layanan *e-government* dalam menyampaikan aspirasi dan mengawasi kinerja pemerintah.

4.6.2. Pengaruh Supremasi Hukum terhadap E-Partisipasi

Diperoleh nilai t-hitung -2.22 dengan probabilitas 0.028 (< 0.05), yang menunjukkan bahwa variabel Supremasi Hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap E-Partisipasi. Hasil ini mengindikasikan bahwa dalam masyarakat dengan supremasi hukum yang tinggi, kepatuhan terhadap aturan yang ketat dapat menciptakan rasa ketergantungan pada otoritas, sehingga masyarakat cenderung menyerahkan keputusan kepada pemerintah tanpa merasa perlu untuk terlibat aktif dalam e-partisipasi. Hal ini selaras dengan konsep jarak kekuasaan tinggi (*power distance*) dalam model budaya Hofstede, di mana masyarakat di negara-negara dengan tingkat hierarki yang kuat lebih menerima keputusan pemerintah tanpa banyak mempertanyakan atau berusaha mempengaruhinya melalui partisipasi digital.

Selain itu, di negara-negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian (*uncertainty avoidance*) yang tinggi, masyarakat cenderung menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau risiko hukum. Ketika regulasi terkait partisipasi digital tidak jelas atau terlalu ketat, masyarakat lebih memilih untuk tidak terlibat dalam platform *e-governance* karena takut akan konsekuensi yang tidak terduga. Fenomena ini terlihat di beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Thailand, di mana kombinasi jarak kekuasaan tinggi dan penghindaran ketidakpastian yang kuat dapat membuat masyarakat lebih memilih jalur komunikasi

yang lebih formal atau melalui perwakilan daripada langsung menyuarakan pendapat secara digital. Dengan demikian, meskipun supremasi hukum penting untuk stabilitas pemerintahan, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan tetap memberikan ruang aman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam *e-governance* tanpa rasa takut atau ketergantungan berlebihan pada otoritas.

4.6.3. Pengaruh Efektivitas Pemerintah terhadap E-Partisipasi

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Pemerintahan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap E-Partisipasi, dengan nilai t-hitung -4,52 dan probabilitas 0,000 ($< 0,05$). Ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi efektivitas pemerintahan maka semakin menurun tingkat keterlibatan masyarakat dalam platform digital partisipasi. Hasil ini dapat dijelaskan dengan adanya persepsi bahwa ketika pemerintah sudah bekerja dengan baik, masyarakat merasa tidak perlu lagi ikut serta dalam pengambilan keputusan atau pengawasan melalui e-partisipasi. Fenomena ini dapat dibuktikan dengan data dari Hofstede dimana negara-negara di Asia memiliki jarak kekuasaan yang tinggi (*power distance*) karena masyarakat lebih menerima keputusan pemerintah tanpa merasa perlu terlibat, serta penghindaran ketidakpastian (*uncertainty avoidance*) tinggi, yang membuat masyarakat lebih nyaman untuk menyerahkan sepenuhnya kebijakan kepada otoritas tanpa merasa perlu memberikan masukan secara daring. Selain itu, dalam masyarakat dengan orientasi jangka panjang (*long term orientation*), kepercayaan terhadap efektivitas pemerintah seringkali mengurangi dorongan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses kebijakan sehari-hari (*Hofstede Insights, n.d.*)

4.6.4. Pengaruh Kebebasan Berpendapat terhadap E-Partisipasi

Nilai t-hitung sebesar 0,31 dengan probabilitas 0,755 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa variabel Kebebasan Berpendapat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap E-Partisipasi. Artinya, meskipun kebebasan berpendapat memiliki hubungan positif dengan e-partisipasi, pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa meskipun masyarakat memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat, hal tersebut tidak selalu diiringi dengan dorongan aktif untuk terlibat dalam e-partisipasi, seperti menyampaikan masukan melalui platform digital pemerintah atau berpartisipasi dalam diskusi daring.

E-partisipasi diukur berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam platform digital, keaktifan mereka dalam memberikan umpan balik terhadap kebijakan, serta frekuensi mereka menggunakan sistem pengaduan online atau forum konsultasi publik. Jika kebebasan berpendapat tersedia tetapi tidak diikuti oleh insentif atau mekanisme yang mendorong partisipasi, masyarakat mungkin tetap pasif dalam menggunakan platform e-partisipasi. Menurut (*Hofstede Insights, n.d.*), hal ini berkaitan dengan *individualism dan power distance*, dalam masyarakat dengan individualisme tinggi, kebebasan berpendapat lebih dihargai, tetapi individu mungkin lebih memilih mengekspresikan pendapatnya dalam lingkup pribadi atau komunitas kecil daripada melalui e-partisipasi formal. Sebaliknya, dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi, meskipun kebebasan berpendapat tersedia, masyarakat masih merasa bahwa keputusan tetap dipegang oleh otoritas, sehingga partisipasi digital mereka tetap rendah.

4.6.5. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap E-Partisipasi

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel Sumber Daya Manusia memiliki nilai t-hitung 1,06 dengan probabilitas 0,289 ($> 0,05$), yang berarti berpengaruh positif namun

tidak signifikan terhadap E-Partisipasi. Ini berarti bahwa meskipun kualitas SDM memiliki hubungan positif dengan tingkat keterlibatan masyarakat dalam e-partisipasi, pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan. Salah satu kemungkinan penyebab dari hasil yang diperoleh ini adalah bahwa meskipun masyarakat di negara-negara Asia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, faktor lain seperti minat, akses teknologi, atau tingkat kepercayaan terhadap pemerintah lebih menentukan apakah mereka benar-benar akan berpartisipasi dalam platform digital pemerintah. Jika kualitas SDM meningkat tetapi tidak diikuti dengan faktor pendukung lain seperti infrastruktur dan teknologi yang memadai atau dorongan dari pemerintah untuk berpartisipasi, maka dampaknya terhadap e-partisipasi bisa tetap rendah. Dalam masyarakat dengan tingkat *uncertainty avoidance* dan *long term orientation* yang tinggi, meskipun SDM memiliki keterampilan teknologi yang baik, mereka tetap enggan untuk berpartisipasi karena takut akan konsekuensi dari keterlibatan mereka atau merasa tidak yakin apakah suara mereka akan berpengaruh. Sementara itu, individu dengan keterampilan tinggi mungkin lebih memilih berinvestasi dalam pendidikan dan karir daripada secara aktif terlibat dalam e-partisipasi, kecuali jika mereka melihat jangka panjang yang jelas dari keterlibatan tersebut (*Hofstede Insights, n.d.*).

4.6.6. Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi terhadap E-Partisipasi

Dari hasil uji, diperoleh nilai t-hitung -0,95 dengan probabilitas 0,342 ($> 0,05$), menunjukkan bahwa variabel Infrastruktur Telekomunikasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap E-Partisipasi. Artinya meskipun hasil menunjukkan bahwa infrastruktur telekomunikasi mungkin menurunkan e-partisipasi, hubungan ini tidak cukup kuat secara statistik untuk dijadikan kesimpulan yang valid. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa meskipun infrastruktur telekomunikasi

tersedia, faktor lain seperti literasi digital, minat masyarakat, serta kepercayaan terhadap platform pemerintah lebih menentukan apakah individu benar-benar akan menggunakan fasilitas tersebut untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan digital. Menurut sumber (*Hofstede Insights, n.d.*), hal ini terjadi karena adanya pengaruh (*power distance*) jarak kekuasaan tinggi dan (*Indulgence*) kecenderungan menikmati hidup. Dalam masyarakat dengan jarak kekuasaan tinggi, meskipun akses terhadap infrastruktur telekomunikasi tersedia, masyarakat mungkin merasa bahwa pengambilan keputusan tetap berada di tangan pemerintah, sehingga mereka tidak terdorong untuk aktif dalam e-partisipasi. Sementara itu, dalam budaya dengan *indulgence* rendah, masyarakat cenderung lebih pasif dalam menggunakan teknologi untuk kepentingan partisipasi politik atau sosial, karena mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan keterlibatan dalam platform digital pemerintahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan membuktikan secara empiris terkait pengaruh Pengendalian Korupsi, Supremasi Hukum, Efektivitas Pemerintah, Kebebasan Berpendapat, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Telekomunikasi terhadap tangka E-Partisipasi di 47 negara-negara di Asia pada tahun 2010-2020. Menurut hasil uji data yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian Korupsi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat E-Partisipasi di negara Asia. Ini dapat diartikan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan dimana semakin baik tingkat Pengendalian Korupsi maka semakin tinggi tingkat E-Partisipasi.
2. Supremasi Hukum memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap E-Partisipasi di negara Asia. Ini mengindikasikan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan namun tidak berjalan searah dimana saat tingkat Supremasi Hukum meningkat tetapi E-Partisipasi justru menurun.
3. Efektivitas Pemerintah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap E-Partisipasi di negara Asia. Artinya kedua variabel memiliki hubungan namun tidak berjalan searah dimana ketika pemerintahan dianggap efektif, masyarakat justru enggan menerapkan E-Partisipasi.
4. Kebebasan Berpendapat memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap E-Partisipasi di negara Asia. Artinya meskipun kebebasan berpendapat tersedia, masyarakat tidak memanfaatkannya untuk terlibat dalam E-Partisipasi.

5. Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap E-Partisipasi di negara Asia. Ini berarti bahwa meskipun kualitas Sumber Daya Manusia meningkat, hal tersebut tidak cukup kuat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam E-Partisipasi.
6. Infrastruktur Telekomunikasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap E-Partisipasi di negara Asia. Artinya, meskipun infrastruktur teknologi seperti akses internet dan perangkat digital tersedia, hal ini tidak serta-merta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam platform e-partisipasi.

5.2. Implikasi

1. Bagi Pemerintah

Pengendalian korupsi meningkatkan e-partisipasi, sementara supremasi hukum dan efektivitas pemerintah justru menurunkannya. Pemerintah perlu membangun kepercayaan publik melalui kebijakan yang lebih terbuka dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam *e-governance* dengan menyediakan platform digital yang lebih interaktif dan inklusif.

2. Bagi Akademisi dan Pemerintah

Penelitian ini mengisi kesenjangan studi tentang e-partisipasi di Asia dan membuka peluang untuk analisis lebih lanjut mengenai faktor budaya dan politik. Studi lanjutan dapat mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memahami bagaimana masyarakat memanfaatkan teknologi dalam kebijakan publik

3. Bagi Masyarakat

Meskipun infrastruktur digital berkembang, tingkat partisipasi masih dipengaruhi oleh kesadaran dan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat perlu lebih aktif

dalam memanfaatkan platform e-partisipasi untuk menyuarakan aspirasi dan mengawasi kebijakan publik.

5.3. Saran

Berikut beberapa saran dari peneliti berdasarkan dari hasil penelitian ini.

1. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan faktor budaya dan kepercayaan publik sebagai variabel baru untuk memahami lebih dalam determinan e-partisipasi. Pendekatan kualitatif juga dapat digunakan untuk melengkapi hasil kuantitatif dengan wawasan langsung dari masyarakat dan pemerintah mengenai hambatan dan peluang dalam e-partisipasi

2. Untuk Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya e-partisipasi dengan lebih aktif memanfaatkan platform digital yang disediakan pemerintah. Literasi digital dan pemahaman tentang kebijakan publik juga perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat lebih efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

3. Untuk Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam e-governance dengan memastikan bahwa platform digital yang ada mudah diakses, responsif, dan transparan. Selain itu, edukasi serta peningkatan kapasitas SDM dalam birokrasi digital perlu diperkuat agar implementasi e-partisipasi lebih inklusif dan efektif di seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbozo, E., & Asamoah, B. K. (2019). The role of e-government systems in ensuring government effectiveness and control of corruption. *R-Economy*, 5(2), 53–60. <https://doi.org/10.15826/recon.2019.5.2.006>
- Baniamin, H. M., Jamil, I., & Askvik, S. (2020). Corruption and citizen participation in digital governance: Evidence from South Asia. *Public Administration Review*, 80(5), 760–776.
- Bannister, F., & Connolly, R. (2014). ICT, public values and transformative government: A framework and programme for research. *Government Information Quarterly*, 31(1), 119–128. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.06.002>
- Bélanger, F., & Carter, L. (2012). Digitizing government interactions with citizens: An empirical investigation of e-government adoption by individuals. *Information Systems Journal*, 22(5), 419–443.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Chadwick, A., & May, C. (2003). Interaction between states and citizens in the age of the internet: “E-government” in the United States, Britain, and the European Union. *Journal of Public Policy*, 16(2), 271–300.
- Chen, X., He, Z., & Wu, J. (2021). The role of rule of law in e-government development: Evidence from global data. *Government Information Quarterly*, 38(1).
- Choi, M. H., & Lee, H. J. (2020). Exploring the role of e-participation in government decision-making. *Journal of e-Government Studies and Best Practices*, 2020, Article 4.
- Cordella, A., & Bonina, C. M. (2012). A public value perspective for ICT-enabled public sector reforms: A theoretical reflection. *Government Information Quarterly*, 29(4), 512–520. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.03.004>
- Freedom House. (2021). *Freedom in the World Report 2021*.
- Heeks, R. (2003). *Most e-government-for-development projects fail: How can risks be reduced?* Institute for Development Policy and Management, University of Manchester.
- Hofstede Insights. (n.d.). *Country comparison tool*. Retrieved February 20, 2025, from <https://www.theculturefactor.com/country-comparison-tool>
- Hwang, H., & Kim, H. (2021). Digital divide and e-participation in developing countries: A study of Myanmar and Afghanistan. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 44–59.
- International Telecommunication Union (ITU). (2021). *The ICT development index: Measuring the information society report*. ITU.

- Islam, M. R., & Khadem, M. A. (2021). Corruption control through e-government in developing countries: A cross-country empirical study. *Information Development*, 37(2), 234–251.
- Kaufmann, D. (2010). *Methodology and analytical issues*.
- Kim, Y., & Chen, H. (2016). Social media and political participation: The role of exposure to opposing perspectives and social pressure. *Computers in Human Behavior*, 59, 156–164.
- Kim, Y., Lee, H., & Kim, S. (2020). E-government and public participation in Korea: The role of professionalism and public service efficiency. *Public Administration Review*, 80(5), 855–865.
- Lee-Geiller, S. (2024). Technology married to good governance and diversity: Explaining e-participation preparedness in government. *Technological Forecasting & Social Change*, 201(November 2023), 123218. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123218>
- Lupu, D., & Lazar, C. G. (2015). Influence of e-government on the level of corruption in some EU countries. *Procedia Economics and Finance*, 20, 365–371.
- Mao, Z., Zhang, W., Zou, Q., & Deng, W. (2024). The effects of e-participation on voice and accountability: Are there differences between countries? *Information Technology for Development*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/02681102.2024.2373745>
- Mariani, I., Mortati, M., Rizzo, F., & Deserti, A. (2024). *An overview on e-participation*. *SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology*, 31–56.
- Meijer, A. (2015). E-governance innovation: Barriers and strategies. *Government Information Quarterly*, 32(2), 198–206. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.01.001>
- Merhi, M. I., & Ahluwalia, P. (2024). The role of e-participation, human capital, and corruption-free on environmental performance. *Information Systems Frontiers*. <https://doi.org/10.1007/s10796-024-10493-y>
- Nam, T. (2018). Understanding e-government service adoption and development: A case study of States in the USA. *Public Administration Quarterly*, 42(1), 3–30.
- Naranjo-Zolotov, M., Oliveira, T., & Casteleyn, S. (2019). Citizens' intention to use and recommend e-participation: Drawing upon UTAUT and citizen empowerment. *Information Technology & People*, 32(2), 364–386.
- Nur, U., Nurmandi, A., & Muhammadiyah, U. (2024). Examining the impact of e-government development index and worldwide governance indicators: A comparative study of Thailand and six selected ASEAN countries. *Politika*, 15(1), 135–158. <https://doi.org/10.14710/politika.15.1.2024.135-158>
- Norris, P. (2017). Strengthening electoral integrity through e-participation. *Political Studies*, 65(2), 385–403.

- OECD. (2020). *Digital literacy and e-participation: How education and skills support the digital society*. OECD Publishing.
- Program, M., Magister, S., Publik, A., Tinggi, S., Administrasi, I., Studi, P., Administrasi, M., Sekolah, P., Ilmu, T., Publik, A., Ilmu, T., & Banten, A. (2024). Analisis implementasi e-participation dalam kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9, 182–200.
- Ruijter, E., Grimmelikhuijsen, S., & Meijer, A. (2017). Open data for democracy: Developing a theoretical framework for open government data practices. *Government Information Quarterly*, 34(1), 45–52.
- Schmidhuber, L., Piller, F., & Bogers, M. (2019). Citizen participation in e-government services: Comparing social media and offline channels. *Government Information Quarterly*, 36(4)
- Smith, M. L., Arfini, S., & Dugdale, A. (2020). Digital governance and the rule of law: Opportunities and challenges. *Information Polity*, 25(3), 285–302.
- Tadese, F., & Amdemikael, W. (2020). Corruption control and its impact on public trust and e-participation: A study of Asian countries. *Public Integrity*, 22(3), 264–278.
- United Nations (UN). (2023). *E-Participation Index (EPI) and Electronic Government Development Index (EGDI) 2023: United Nations E-Government Survey*. UN. <https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/united-nations-e-government-survey-2023/>
- Van Dijk, J. (2020). The digital divide and e-government: An analysis of social and technological inequalities. *New Media & Society*, 22(7), 1231–1249.
- Waheduzzaman, W., & Khandaker, S. (2022). E-participation for combating corruption, increasing voice and accountability, and developing government effectiveness: A cross-country data analysis. *Australian Journal of Public Administration*, 81(4), 549–568. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12544>
- Welp, Y., & Breuer, A. (2021). Digital democracy in the Global South: Assessing the impact of ICTs on political participation. *Information Polity*, 26(1), 25–42.
- Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. (2018). Open government: Origin, development, and conceptual perspectives. *International Journal of Public Administration*, 41(7), 596–611.
- World Bank. (2022). *Efektivitas pemerintah and e-participation: The role of public sector management in digital governance*. World Bank Group.
- Zuiderwijk, A., Janssen, M., & Dwivedi, Y. K. (2015). Acceptance and use predictors of open data technologies: Drawing upon the unified theory of acceptance and use of technology. *Government Information Quarterly*, 32(4), 429–440.

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Data Penelitian

1.1 Data Panel Penelitian

No.	Negara	Tahun	COC	ROL	GEV	VOA	HUC	TI	EPT
1	Afghanistan	2010	-1.65	-1.87	-1.48	1404	0.1202	0.0328	0.0571
		2012	-1.43	-1.65	-1.38	-1.27	0.2178	0	0
		2014	-1.36	-1.44	-1.36	-1.14	0.2418	0.1472	0.1373
		2016	-1.53	-1.51	-1.25	-1.04	0.283	0.1066	0.4237
		2018	-1.49	-1.68	-1.48	-1.01	0.3562	0.1138	0.3202
		2020	-1.48	-1.82	-1.59	-1.08	0.3728	0.1762	0.4643
2	Armenia	2010	-0.7	-0.48	-0.17	-848	0.3009	0.128	0.0429
		2012	-0.59	-0.42	-0.03	-0.57	0.8505	0.3217	0
		2014	-0.57	-0.42	-0.25	-0.56	0.766	0.3889	0.5294
		2016	-0.64	-0.14	-0.28	-0.58	0.7338	0.3922	0.5254
		2018	-0.39	-0.18	-0.14	-0.14	0.7547	0.466	0.5674
		2020	0.02	-0.1	-0.27	0.05	0.7872	0.6536	0.75
3	Azerbaijan	2010	-1.25	-0.89	-0.81	-1305	0.3031	0.1329	0.1714
		2012	-1.14	-0.88	-0.79	-1.3	0.8259	0.3033	0.1316
		2014	-1.02	-0.7	-0.31	-1.48	0.748	0.4605	0.4314
		2016	-0.83	-0.52	-0.12	-1.56	0.7158	0.4852	0.678
		2018	-0.83	-0.6	-0.1	-1.51	0.7369	0.5062	0.6798
		2020	-1.06	-0.72	-0.12	-1.54	0.7713	0.6528	0.6905
4	Bahrain	2010	0.18	0.43	0.45	-966	0	0.5855	0.6714
		2012	0.37	0.25	0.54	-1.32	0.8028	0.4183	0.6579
		2014	0.27	0.41	0.56	-1.31	0.784	0.7055	0.8235
		2016	-0.02	0.45	0.33	-1.37	0.7178	0.7762	0.7458
		2018	-0.15	0.41	0.18	-1.42	0.7897	0.8466	0.7978
		2020	-0.07	0.48	0.42	-1.45	0.8439	0.8319	0.7738
5	Bangladesh	2010	-1.05	-0.8	-0.75	-268	0.171	0.033	0.1
		2012	-0.86	-0.94	-0.81	-0.4	0.3889	0.0641	0.0789
		2014	-0.89	-0.78	-0.77	-0.47	0.3866	0.941	0.3922
		2016	-0.86	-0.66	-0.68	-0.58	0.3973	0.1193	0.5254
		2018	-0.9	-0.63	-0.74	-0.75	0.4763	0.1976	0.8034
		2020	-0.98	-0.56	-0.76	-0.77	0.5731	0.3717	0.5714
6	Bhutan	2010	0.94	0.16	0.6	-417	0.1757	0.0619	0.0714
		2012	0.95	0.26	0.55	-0.28	0.4153	0.1143	0.0263
		2014	1.31	0.42	0.3	-0.1	0.429	0.1755	0.3529
		2016	1.14	0.53	0.56	-0.03	0.5139	0.2192	0.3559
		2018	1.64	0.57	0.4	0.03	0.4743	0.308	0.5281
		2020	1.66	0.61	0.45	0.15	0.5139	0.5367	0.631
7	Brunei Darussalam	2010	0.86	0.77	0.9	-651	0.2943	0.2703	0.1714
		2012	0.54	0.79	0.84	-0.51	0.8253	0.455	0.4737
		2014	0.53	0.47	1.08	-0.63	0.7815	0.369	0.0588
		2016	0.56	0.56	1.08	-0.9	0.731	0.3512	0.3729
		2018	0.79	0.62	1.25	-0.86	0.748	0.6066	0.6067
		2020	1.28	0.92	1.43	-0.93	0.7605	0.8209	0.5476
8	Cambodia	2010	-1.25	-1.12	-0.96	-927	0.2316	0.0297	0.1143
		2012	-1.08	-0.98	-0.82	-0.96	0.5997	0.0814	0
		2014	-1.15	-0.95	-0.69	-1.11	0.5189	0.2075	0.1961
		2016	-1.28	-1.07	-0.69	-1.11	0.4785	0.2486	0.0678
		2018	-1.34	-1.12	-0.56	-1.24	0.5626	0.3132	0.1742
		2020	-1.25	-0.94	-0.39	-1.36	0.5344	0.5466	0.4167

9	China	2010	-0.57	-0.47	0.08	-1681	0.2817	0.1913	0.3714
		2012	-0.44	-0.55	0	-1.64	0.7745	0.3039	0.2105
		2014	-0.34	-0.4	0.35	-1.62	0.6734	0.3554	0.6471
		2016	-0.24	-0.31	0.38	-1.56	0.686	0.3673	0.8136
		2018	-0.26	-0.17	0.52	-1.46	0.7088	0.4735	0.9045
		2020	-0.05	-0.08	0.68	-1.65	0.7396	0.7388	0.9643
10	Cyprus	2010	0.97	1.21	1.53	1023	0	0.4327	0.4857
		2012	1.24	1.09	1.38	1.02	0.8751	0.5153	0.0789
		2014	1.07	1.07	1.14	1.02	0.7828	0.532	0.3137
		2016	0.82	0.72	0.96	1.05	0.7782	0.4923	0.5254
		2018	0.64	0.75	0.91	1.01	0.8083	0.7279	0.8202
		2020	0.37	0.57	0.88	0.91	0.8429	0.9057	0.9524
11	Democratic People's Republic of Korea (Korea Utara)	2010	-1.28	-1.38	-1.87	-2.23	0	0.0045	0
		2012	-1.29	-1.35	-1.91	-2.24	0.956	0.0112	0
		2014	-1.3	-1.62	-1.64	-2.19	0.8007	0.173	0.0196
		2016	-1.45	-1.67	-1.62	-2.18	0.7822	0.363	0.0169
		2018	-1.57	-1.63	-1.57	-2.21	0.615	0.327	0
		2020	-1.69	-1.6	-1.47	-2.16	0.6402	0.0127	0.0357
12	Georgia	2010	0.01	-0.21	0.34	-161	0.3022	0.1164	0.0571
		2012	0.4	-0.01	0.64	0.02	0.8348	0.2328	0.2105
		2014	0.83	0.22	0.43	0.28	0.7895	0.4261	0.5882
		2016	0.75	0.36	0.46	0.3	0.7763	0.4184	0.5593
		2018	0.76	0.29	0.56	0.22	0.8333	0.5403	0.6236
		2020	0.63	0.24	0.75	0.06	0.8717	0.6923	0.6429
13	India	2010	-0.46	-0.04	0.03	443	0.2123	0.0583	0.2
		2012	-0.51	-0.06	-0.16	0.4	0.5025	0.1102	0.1842
		2014	-0.46	-0.07	-0.23	0.41	0.4698	0.1372	0.6275
		2016	-0.31	-0.04	0.09	0.44	0.5019	0.143	0.7627
		2018	-0.21	0.02	0.3	0.35	0.5484	0.2009	0.9551
		2020	-0.27	-0.03	0.41	0.15	0.5848	0.3515	0.8571
14	Indonesia	2010	-0.8	-0.66	-0.27	-38	0.2818	0.1143	0.1286
		2012	-0.69	-0.58	-0.33	0.07	0.7982	0.1897	0.2105
		2014	-0.6	-0.31	-0.06	0.15	0.6786	0.3054	0.2941
		2016	-0.44	-0.32	-0.02	0.17	0.6796	0.3016	0.3729
		2018	-0.28	-0.29	0.18	0.15	0.6857	0.3222	0.618
		2020	-0.43	-0.33	0.35	0.1	0.7342	0.5669	0.75
15	Iran (Islamic Republic of)	2010	-0.95	-1.03	-0.48	-1.61	0.2616	0.2157	0.0714
		2012	-0.8	-0.92	-0.53	-1.6	0.7089	0.2638	0.1842
		2014	-0.63	-1.05	-0.43	-1.58	0.6882	0.294	0.2941
		2016	-0.72	-0.68	-0.19	-1.34	0.7101	0.3514	0.2034
		2018	-0.96	-0.7	-0.43	-1.33	0.7364	0.4566	0.5281
		2020	-1.09	-0.87	-0.99	-1.48	0.7686	0.621	0.4643
16	Iraq	2010	-1.36	-1.71	-1.1	-992	0.2295	0.0552	0.0429
		2012	-1.25	-1.57	-1.06	-1.08	0.6151	0.1201	0.1053
		2014	-1.36	-1.45	-1.06	-1.14	0.5283	0.2173	0.1373
		2016	-1.45	-1.76	-1.2	-1.02	0.4803	0.1647	0.4237
		2018	-1.44	-1.79	-1.25	-1	0.5094	0.184	0.3371
		2020	-1.32	-1.78	-1.28	-1.01	0.4358	0.537	0.3095
17	Israel	2010	0.75	0.91	1.39	584	0	0.4334	0.4143
		2012	0.9	0.93	1.27	0.64	0.8945	0.6859	0.8947
		2014	0.86	1.11	1.21	0.73	0.8545	0.72	0.8627
		2016	1.18	1.06	1.34	0.79	0.8619	0.6175	0.8305
		2018	0.78	0.99	1.2	0.62	0.8635	0.7095	0.8315
		2020	0.56	0.97	1.09	0.65	0.8924	0.8689	0.7143
18	Japan	2010	1.55	1.32	1.52	1041	0	0.5242	0.7571
		2012	1.62	1.35	1.41	1.1	0.8969	0.646	0.7368
		2014	1.69	1.6	1.81	1.04	0.8621	0.8553	0.9608

		2016	1.52	1.41	1.81	0.98	0.8274	0.8277	0.9831
		2018	1.42	1.53	1.67	0.98	0.8428	0.8406	0.9831
		2020	1.49	1.51	1.59	0.99	0.8684	0.9223	0.9881
19	Jordan	2010	0.04	0.15	0.1	-799	0.2869	0.1806	0.2857
		2012	0.07	0.35	0.05	-0.73	0.8013	0.2717	0.1053
		2014	0.14	0.47	0.14	-0.75	0.7202	0.3104	0.4706
		2016	0.28	0.27	0.16	-0.71	0.7344	0.3458	0.4576
		2018	0.15	0.25	0.13	-0.72	0.7387	0.4406	0.4831
		2020	0.06	0.22	0.13	-0.75	0.68	0.554	0.3333
20	Kazakhstan	2010	-1	-0.7	-0.49	-1.13	0.3194	0.1797	0.5571
		2012	-0.92	-0.77	-0.52	-1.18	0.9134	0.3555	0.9474
		2014	-0.83	-0.61	-0.07	-1.18	0.8619	0.5749	0.7647
		2016	-0.81	-0.5	-0.1	-1.21	0.8401	0.5668	0.5932
		2018	-0.47	-0.49	-0.01	-1.21	0.8388	0.5723	0.8371
		2020	-0.36	-0.44	0.14	-1.18	0.8866	0.7024	0.881
21	Kuwait	2010	0.3	0.59	0.16	-524	0	0.2524	0.2286
		2012	-0.2	0.36	-0.07	-0.64	0.7885	0.4179	0.1842
		2014	-0.25	0.02	-0.15	-0.66	0.7194	0.5862	0.4314
		2016	-0.27	0.02	-0.16	-0.63	0.7287	0.743	0.6441
		2018	-0.29	0.21	-0.09	-0.61	0.6852	0.7394	0.691
		2020	-0.07	0.33	-0.16	-0.68	0.747	0.7858	0.9048
22	Kyrgyzstan	2010	-1.18	-1.27	-0.66	-0.93	0.3035	0.0918	0.4286
		2012	-1.15	-1.13	-0.65	-0.61	0.8485	0.1903	0.2895
		2014	-1.13	-0.94	-0.87	-0.46	0.7413	0.3801	0.4118
		2016	-1.07	-1.04	-0.91	-0.42	0.7508	0.3123	0.5932
		2018	-0.93	-0.92	-0.61	-0.36	0.7628	0.3418	0.6854
		2020	-1.1	-0.94	-0.53	-0.59	0.7873	0.5902	0.7143
23	Lao People's Democratic Republic (Laos)	2010	-1.2	-0.97	-0.86	-1.68	0.2259	0.0329	0.1286
		2012	-1.03	0	0	-1.64	0.5651	0.0998	0
		2014	-0.85	-0.76	-0.41	-1.73	0.4941	0.1618	0.1961
		2016	-0.96	-0.8	-0.39	-1.76	0.4907	0.1537	0.2712
		2018	-0.97	-0.85	-0.67	-1.75	0.5254	0.2246	0.1742
		2020	-1.07	-0.86	-0.75	-1.79	0.5539	0.2383	0.2143
24	Lebanon	2010	-0.92	-0.64	-0.13	-331	0.2833	0.1965	0.2714
		2012	-0.87	-0.7	-0.23	-0.39	0.7917	0.2728	0.3158
		2014	-1.04	-0.72	-0.25	-0.42	0.7374	0.403	0.2941
		2016	-0.97	-0.8	-0.44	-0.52	0.6882	0.4911	0.4915
		2018	-1.11	-0.77	-0.64	-0.52	0.6649	0.5219	0.4438
		2020	-1.16	-0.89	-1.18	-0.55	0.6567	0.4123	0.3333
25	Malaysia	2010	0.06	0.39	1.06	-500	0.2819	0.3438	0.6571
		2012	0.21	-0.38	-0.92	-0.35	0.7691	0.451	5000
		2014	0.4	0.52	1.16	-0.36	0.7119	0.4455	0.2941
		2016	0.06	0.41	0.86	-0.42	0.6953	0.4397	0.678
		2018	0.33	0.55	1.1	-0.11	0.6987	0.5647	0.8876
		2020	0.25	0.59	1.06	-0.15	0.7513	0.7634	0.8571
26	Maldives	2010	-0.54	-0.32	-0.19	-63	0.2889	0.2886	0.0714
		2012	-0.7	-0.54	-0.19	-0.47	0.8114	0.3599	0.0263
		2014	-0.36	-0.52	-0.34	-0.37	0.6865	0.3952	0.2745
		2016	-0.65	-0.38	-0.27	-0.73	0.6301	0.437	0.2203
		2018	-0.87	-0.54	-0.45	-0.68	0.6754	0.5159	0.4101
		2020	-0.33	-0.29	-0.01	-0.32	0.6886	0.5981	0.4405
27	Mongolia	2010	-0.73	-0.36	-0.57	88	0	0.1036	0.4286
		2012	-0.54	-0.37	-0.63	0.07	0.8688	0.1758	0.6053
		2014	-0.47	-0.33	-0.43	0.24	0.7887	0.2714	0.6863
		2016	-0.48	-0.21	-0.08	0.33	0.7597	0.2841	0.7119
		2018	-0.42	-0.26	-0.22	0.24	0.7899	0.3602	0.736
		2020	-0.47	-0.24	-0.37	0.38	0.8063	0.6135	0.6071

28	Myanmar	2010	-1.67	-1.55	-1.62	-2067	0.2522	0.0045	0
		2012	-1.07	-1.36	1.48	-1.62	0.7064	0	0
		2014	-0.88	-1.19	-1.3	-1.34	0.5288	0.84	0.0784
		2016	-0.62	-0.89	-0.99	-0.8	0.4837	0.655	0.1017
		2018	-0.59	-1.03	-1.08	-0.91	0.5127	0.2565	0.1348
		2020	-0.66	-1.17	-1.02	-0.94	0.5125	0.5234	0.2619
29	Nepal	2010	-0.7	-0.96	-0.89	-447	0.1921	0.0227	0.0571
		2012	-0.81	-0.74	-0.99	-0.64	0.4521	0.0597	0.0263
		2014	-0.59	-0.65	-0.86	-0.43	0.3774	0.1684	0.2941
		2016	-0.8	-0.8	-0.83	-0.25	0.4714	0.1675	0.5085
		2018	-0.66	-0.48	-0.9	-0.14	0.4957	0.2413	0.7809
		2020	-0.57	-0.49	-0.94	-0.08	0.5405	0.4691	0.369
30	Oman	2010	0.32	0.54	0.37	-1045	0.2633	0.2092	0.1571
		2012	0.18	-0.52	-0.26	-1.02	0.7224	0.3942	0.4474
		2014	0.3	0.49	0.26	-1.09	0.6624	0.4873	0.7059
		2016	0.33	0.4	0.19	-1.05	0.6796	0.5147	0.5593
		2018	0.24	0.46	0.18	-1.04	0.7013	0.5399	0.8315
		2020	0.23	0.62	0.14	-1.14	0.7751	0.6967	0.8333
31	Pakistan	2010	-1.09	-0.74	-0.77	-799	0.1658	0.0771	0.1714
		2012	-1.07	-0.88	-0.78	-0.84	0.3572	0.1239	0.1316
		2014	-0.84	-0.75	-0.76	-0.72	0.3337	0.1174	0.3333
		2016	-0.87	-0.8	-0.65	-0.7	0.319	0.1299	0.3729
		2018	-0.78	-0.67	-0.63	-0.82	0.3682	0.1529	0.2528
		2020	-0.83	-0.69	-0.54	-0.88	0.3818	0.2437	0.5238
32	Philippines	2010	-0.78	-0.55	0.08	-39	0.2931	0.1115	0.1857
		2012	-0.57	-0.52	-0.21	-0.03	0.8341	0.2082	0.2105
		2014	-0.44	-0.37	0.32	0.16	0.7051	0.2451	0.5686
		2016	-0.5	-0.41	0.06	0.16	0.6839	0.3791	0.5932
		2018	-0.55	-0.55	0.1	0.01	0.7171	0.3547	0.9382
		2020	-0.49	-0.63	0.1	-0.1	0.7544	0.5838	0.75
33	Qatar	2010	1.4	0.85	0.84	-1012	0	0.3168	0.1286
		2012	1.05	0.95	-0.93	-0.92	0.7316	0.4513	0.6316
		2014	0.98	0.86	0.94	-1.13	0.6671	0.5879	0.6078
		2016	0.9	0.79	0.73	-1.15	0.7317	0.6041	0.6441
		2018	0.72	0.73	0.63	-1.21	0.6683	0.6797	0.7135
		2020	0.78	1	0.9	-1.29	0.6698	0.8233	0.6548
34	Republic of Korea (Korea Selatan)	2010	0.43	1.01	1.15	0.74	0	0.639	10
		2012	0.5	-0.98	1.08	0.73	0.9494	0.8356	10
		2014	0.51	1.01	1.04	0.68	0.9273	0.935	0.10000
		2016	0.45	1.15	1.06	0.64	0.8795	0.853	0.9661
		2018	0.6	1.23	1.18	0.79	0.8743	0.8496	1
		2020	0.72	1.18	1.41	0.82	0.8997	0.9684	1
35	Saudi Arabia	2010	0.04	0.15	-0.01	-1788	0	0.4031	0.1
		2012	-0.05	0.14	0.03	-1.87	0.7677	0.4323	0.6316
		2014	0.08	0.13	0.21	-1.88	0.7461	0.5523	0.5686
		2016	0.22	0.33	0.26	-1.73	0.7995	0.5733	0.7119
		2018	0.36	0.14	0.32	-1.7	0.8101	0.5339	0.7135
		2020	0.27	0.24	0.14	-1.61	0.8648	0.8442	0.7143
36	Singapore	2010	2.17	1.62	2.24	-209	0	0.6386	0.6857
		2012	2.12	1.72	2.16	0.05	0.85	0.6923	0.9474
		2014	2.07	1.82	2.18	-0.1	0.8515	0.8793	0.9020
		2016	2.08	1.82	2.2	-0.15	0.836	0.8414	0.9153
		2018	2.17	1.84	2.22	-0.08	0.8557	0.8019	0.9663
		2020	2.15	1.87	2.32	-0.2	0.8904	0.8899	0.9762
37	Sri Lanka	2010	-0.42	-0.12	-0.2	-505	0.2753	0.1081	0.1429
		2012	-0.24	0.11	0.2	-0.58	0.7357	0.1922	0.0789
		2014	-0.35	-0.15	0.07	-0.67	0.7376	0.2341	0.6471

		2016	-0.3	0.13	0.01	-0.08	0.7369	0.2445	0.661
		2018	-0.33	0.02	-0.23	-0.02	0.7451	0.3136	0.6292
		2020	-0.31	0.01	-0.05	-0.05	0.766	0.5289	0.7143
38	Syrian Arab Republic	2010	-1.1	-0.59	-0.44	-1697	0.2564	0.1209	0.0143
		2012	-1.22	-1.13	1.15	-1.84	0.6876	0.1952	0.0263
		2014	-1.56	-1.36	-1.4	-1.88	0.5835	0.1992	0.0980
		2016	-1.58	-1.99	-1.81	-1.99	0.4864	0.2087	0.4576
		2018	-1.63	-2.05	-1.67	-1.97	0.486	0.2532	0.3652
		2020	-1.72	-2.07	-1.73	-1.93	0.5073	0.3804	0.5119
39	Tajikistan	2010	-1.3	-1.21	-0.93	-1431	0.2972	0.0615	0.0286
		2012	-1.28	-1.21	0.93	-1.42	0.8313	0.1474	0
		2014	-1.13	-1.01	-0.79	-1.5	0.7249	0.2306	0.1176
		2016	-1.15	-1.16	-1.04	-1.69	0.7001	0.1866	0.2034
		2018	-1.41	-1.29	-1.11	-1.7	0.7002	0.2254	0.3876
		2020	-1.33	-1.23	-0.71	-1.78	0.7274	0.3496	0.3452
40	Thailand	2010	-0.36	-0.23	0.09	-496	0.2943	0.1746	0.0857
		2012	-0.4	-0.17	0.14	-0.32	0.7819	0.2361	0.3158
		2014	-0.48	-0.22	0.27	-0.87	0.664	0.2843	0.5490
		2016	-0.43	-0.01	0.27	-1.02	0.6942	0.4117	0.5932
		2018	-0.44	0.02	0.3	-1.02	0.7903	0.5338	0.6517
		2020	-0.46	0.12	0.23	-0.81	0.7751	0.7004	0.7738
41	Timor-Leste	2010	-0.75	-1.19	-1.25	62	0.1797	0.0068	0.0143
		2012	0.16	-0.04	0.43	-0.21	0.7726	0.3478	0.0526
		2014	-0.53	-1.11	-1.21	0.15	0.4831	0.704	0.2941
		2016	-0.53	-1.16	-1.03	0.22	0.4843	0.728	0.2712
		2018	-0.48	-1.12	-0.97	0.31	0.5387	0.2937	0.2697
		2020	-0.32	-1.17	-0.76	0.37	0.5599	0.3935	0.4881
42	Turkey	2010	0.03	0.05	0.31	-0.08	0.2752	0.2581	0.2143
		2012	0.16	-0.04	0.43	-0.21	0.7726	0.3478	0.0526
		2014	-0.13	-0.08	0.39	-0.34	0.7133	0.3605	0.4902
		2016	-0.17	-0.33	0.03	-0.61	0.791	0.3775	0.6271
		2018	-0.33	-0.37	-0.03	-0.85	0.8148	0.4298	0.8596
		2020	-0.34	-0.41	-0.13	-0.86	0.8287	0.628	0.8929
43	Turkmenistan	2010	-1.44	-1.47	-1.52	-2040	0.2992	0.0414	0
		2012	-1.31	-1.38	-1.12	-2.25	0.8404	0.1139	0
		2014	-1.18	-1.34	-0.51	-2.26	0.7478	0.2189	0.1176
		2016	-1.38	-1.48	-0.86	-2.17	0.6583	0.2559	0.0678
		2018	-1.36	-1.45	-1.05	-2.15	0.6626	0.3011	0.1124
		2020	-1.41	-1.38	-0.99	-2.03	0.6783	0.3555	0.2024
44	United Arab Emirates	2010	0.89	0.32	0.89	-904	0	0.5434	0.1286
		2012	1.16	0.53	1.14	-1	0.7837	0.5568	0.7368
		2014	1.2	0.65	1.43	-1.06	0.6657	0.5932	0.8431
		2016	1.17	0.84	1.41	-1.05	0.6752	0.6881	0.7458
		2018	1.15	0.8	1.42	-1.13	0.6877	0.8564	0.9438
		2020	1.11	0.91	1.32	-1.18	0.732	0.9344	0.9405
45	Uzbekistan	2010	-1.31	-1.42	-0.72	-2086	0.2931	0.0854	0.3143
		2012	-1.31	-1.3	-0.91	-2.03	0.8255	0.2075	0.2368
		2014	-1.19	-1.13	-0.62	-1.91	0.7264	0.2333	0.4706
		2016	-1.18	-1.12	-0.58	-1.89	0.6954	0.2463	0.678
		2018	-1.06	-1.09	-0.55	-1.63	0.7396	0.3307	0.7584
		2020	-1.05	-1.08	-0.53	-1.53	0.7434	0.4736	0.8095
46	Vietnam	2010	-0.62	-0.58	-0.25	-1.5	0.2672	0.2261	0.0857
		2012	-0.53	-0.55	-0.26	-1.42	0.7434	0.3969	0.1053
		2014	-0.44	-0.36	-0.05	-1.37	0.6148	0.3792	0.4902
		2016	-0.46	0.08	0.03	-1.37	0.5989	0.3715	0.6949
		2018	-0.49	-0.01	0	-1.48	0.6543	0.389	0.691
		2020	-0.35	-0.16	0.23	-1.38	0.6779	0.6694	0.7024

47	Yemen	2010	-1.19	-1.09	-1.03	-1.33	0.1894	0.0298	0.0429
		2012	-1.26	-1.28	-1.28	-1.35	0.4642	0.1011	0
		2014	-1.57	-1.2	-1.44	-1.3	0.384	0.1249	0.2745
		2016	-1.68	-1.67	-1.87	-1.69	0.3829	0.1465	0.1356
		2018	-1.64	-1.8	-2.26	-1.76	0.4037	0.1454	0.118
		2020	-1.69	-1.78	-2.35	-1.77	0.4142	0.1757	0.3095

Lampiran 2 – Tabulasi Data Stata 17

2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
coc	282	-.3247872	.8970439	-1.72	2.17
rol	282	-.2989362	.8681184	-2.07	1.87
gev	282	-.0819149	.907544	-2.35	2.32
voa	282	-89.99926	365.7592	-2086	1041
huc	282	.6021245	.2360235	0	.956
ti	282	.3888606	.2419135	0	.9684
ept	282	18.23886	297.7165	0	5000

2.2 Hasil Uji Chow

```

. xtreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6, fe

Fixed-effects (within) regression              Number of obs   =    282
Group variable: id                            Number of groups =    47

R-squared:                                     Obs per group:
  Within = 0.1396                               min           =     6
  Between = 0.0294                              avg           =    6.0
  Overall = 0.0171                              max           =     6

corr(u_i, Xb) = -0.6889                        F(6,229)       =    6.19
                                                Prob > F       =    0.0000

```

y	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
x1	309.8113	117.6802	2.63	0.009	77.93694 541.6857
x2	-205.8184	92.82961	-2.22	0.028	-388.7278 -22.90907
x3	-252.5037	55.84879	-4.52	0.000	-362.5469 -142.4606
x4	.0171259	.0549143	0.31	0.755	-.091076 .1253277
x5	106.8676	100.546	1.06	0.289	-91.24594 304.9811
x6	-123.1162	129.2869	-0.95	0.342	-377.8601 131.6278
_cons	21.71999	77.65777	0.28	0.780	-131.2951 174.7351

```

sigma_u   212.68646
sigma_e   279.7325
rho       .36632171 (fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0: F(46, 229) = 1.67                Prob > F = 0.0078

```

2.3 Hasil Uji Hausman

```

. xtreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6, re

Random-effects GLS regression              Number of obs   =    282
Group variable: id                        Number of groups =    47

R-squared:                                Obs per group:
  Within = 0.1174                          min           =     6
  Between = 0.8199                          avg           =    6.0
  Overall = 0.8398                          max           =     6

corr(u_1, X) = 0 (assumed)                Wald chi2(6)    =    13.76
                                           Prob > chi2    =    0.0325

```

	y	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
	x1	167.3736	59.44268	2.82	0.005	50.86807 283.8791
	x2	-45.51374	66.87258	-0.68	0.496	-176.5816 85.55411
	x3	-132.9119	46.1935	-2.88	0.004	-223.4495 -42.37427
	x4	-.0069175	.0520207	-0.13	0.894	-.1088762 .0950413
	x5	111.4061	93.35909	1.19	0.233	-71.57432 294.3866
	x6	-20.33008	109.0105	-0.19	0.852	-233.9867 193.3266
	_cons	-11.69087	61.50585	-0.19	0.849	-132.2401 108.8584
	sigma_u	57.281558				
	sigma_e	279.7325				
	rho	.04824431	(fraction of variance due to u_1)			

2.4 Hasil Uji Multikolinearitas

	coc	rol	gev	voa	huc	ti
coc	1.0000					
rol	0.9335	1.0000				
gev	0.8726	0.8947	1.0000			
voa	0.1446	0.1457	0.1485	1.0000		
huc	0.2166	0.2464	0.2884	0.3831	1.0000	
ti	0.6075	0.6303	0.5960	0.2557	0.5133	1.0000

2.5 Hasil Uji T

	y	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
	x1	309.8113	117.6802	2.63	0.009	77.93694 541.6857
	x2	-205.8184	92.82961	-2.22	0.028	-388.7278 -22.90907
	x3	-252.5037	55.84879	-4.52	0.000	-362.5469 -142.4606
	x4	.0171259	.0549143	0.31	0.755	-.091076 .1253277
	x5	106.8676	100.546	1.06	0.289	-91.24594 304.9811
	x6	-123.1162	129.2869	-0.95	0.342	-377.8601 131.6278
	_cons	21.71999	77.65777	0.28	0.780	-131.2951 174.7351
	sigma_u	212.68646				
	sigma_e	279.7325				
	rho	.36632171	(fraction of variance due to u_i)			

2.6 Hasil Uji F

```

Fixed-effects (within) regression              Number of obs   =    282
Group variable: id                        Number of groups =    47

R-squared:                                Obs per group:
  Within = 0.1396                          min           =     6
  Between = 0.0294                          avg           =    6.0
  Overall = 0.0171                          max           =     6

corr(u_i, Xb) = -0.6889                    F(6,229)       =    6.19
                                           Prob > F       =    0.0000

```